

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENCEGAHAN HIV/AIDS DI PROVINSI BANTEN

**(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten
dengan Menggunakan Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Konsentrasi
Hubungan Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi



Oleh:

Trina Dhamartika

6662142661

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
BANTEN
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trina Dhamartika

NIM : 6662142661

Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 2 Mei 1996

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Komunikasi dalam Pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten (Studi Deskriptif Kualitatif pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dengan Menggunakan Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly)”** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 26 Juli 2018



Trina Dhamartika

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Trina Dhamartika
NIM : 6662142661
Judul : **STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENCEGAHAN HIV/AIDS DI PROVINSI BANTEN** (Studi Deskriptif Kualitatif pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dengan Menggunakan Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly)

Serang, 26 Juli 2018

Skripsi ini telah disetujui untuk disajikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



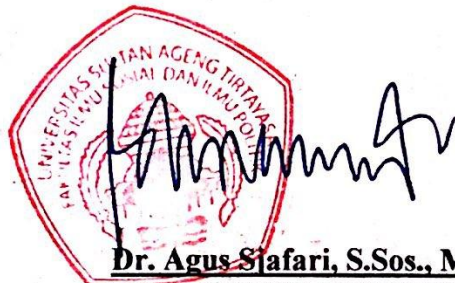
Muhammad Jaiz, S.Sos., M.Pd.
NIP.19710629200312001



Ail Muldi, M.I.Kom
NIP.198303062015041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Trina Dhamartika
NIM : 6662142661
Judul Skripsi : **STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENCEGAHAN
HIV/AIDS DI PROVINSI BANTEN (Studi Deskriptif
Kualitatif Pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten
dengan Menggunakan Model Perencanaan Komunikasi Philip
Lesly)**

Telah diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 19 Juli 2018
dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 19 Juli 2018

Ketua Penguji

Dr. Naniek Afrilla Framanik, M.Si
NIP : 197704032003122001



Anggota:

Darwis Sagita, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP : 198305162008121002



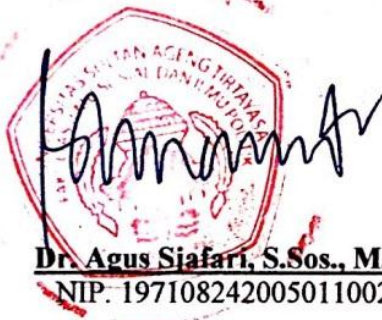
Anggota:

Ail Muldi, M.I.Kom
NIP : 198303062015041001



Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta



Dr. Agus Sifari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Bahmi Winangsih, M.Si
NIP. 196810192005012001

Experience Is The Best Friend You Had

Impression Is The Best Thing You Had..

This is to you,

Ayah & Mamah

ABSTRAK

Trina Dhamartika, NIM 6662142661. Skripsi. Strategi Komunikasi dalam Pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Komisi Penanggulangan AIDS dengan Menggunakan Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly). Pembimbing I: Muhammad Jaiz, S.Sos., M.Pd dan Pembimbing II: Ail Muldi, M.I.Kom.

Penelitian ini didasari oleh permasalahan HIV AIDS dengan kasus yang terus meningkat dan masih adanya stigma buruk dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS sebagai organisasi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan HIV AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan KPA dalam merencanakan sebuah kegiatan yang bersifat preventif dalam menanggulangi permasalahan HIV/AIDS di Provinsi Banten. Konsep teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen serta dianalisis menggunakan teknik Triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan KPA dirancang dalam beberapa tahapan, yakni (1) dalam tahapan analisis dan riset adalah tingkat pengetahuan yang rendah mengenai penyakit HIV, mengedukasi masyarakat mengenai penyakit HIV AIDS, dan perencanaan ulang kegiatan, (2) dalam tahapan perumusan kebijakan yaitu mengetahui dan peduli mengenai permasalahan HIV/AIDS, menerapkan materi komunikasi persuasif untuk perubahan perilaku, (3) dalam tahapan perencanaan program pelaksanaan yaitu menyiapkan masyarakat, tenaga kesehatan, penganggaran yang bersumber dari APBD, (4) dan dalam tahapan kegiatan komunikasi adalah melalui saluran komunikasi yang diantaranya adalah *workshop*, Web KPAN dalam E-Library Pusat Informasi AIDS Nasional www.aidsindonesia.or.id, surat kabar, komunikasi tatap muka, surat kabar online, telepon, dan Rapat Koordinasi.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Pencegahan, Model Perencanaan Philip Lesly.

ABSTRACT

Trina Dhamartika. NIM 6662142661. Thesis. Communication Strategy in Prevention of HIV/AIDS in Banten Province (Qualitative Descriptive Study at AIDS Commission at Banten Province by using Communication Planning Model by Philip Lesly). Mentor I: Muhammad Jaiz, S.Sos., M.Pd and Mentor II: Ail Muldi, M.I.Kom.

This research is base on HIV/AIDS's problems that the cases keep increasing and there is still a bad stigma and also discrimination against ODHA (people with HIV AIDS). This problems becomes one of the reasons for the establishment of AIDS Commission as an organization that has given the assignment by the government to tackle the problem of HIV AIDS. The purpose of this research was to found out and describe how the communication strategy that KPA did in planning a preventive activity in tackling HIV/AIDS's problems in Banten Province. The theory concept that used in this research is Communication Planning Model by Philip Lesly. This research used qualitative as the method. The results showed that communication strategy designed based on several steps, (1) in the analysis and research's step are people still unknowledgeable about HIV disease, educate people about HIV/AIDS disease, and re-planning program, (2) in the policy fformulation's step are knowing and caring about HIV/AIDS issues, applying persuasive communication materials, (3) in the planning program implementation are prepared the community, health workers, budgeting sourced from APBD, (4) and in the communication activities's stage are through communication channels such as workshop, used KPAN's Web in E-Library Information Center AIDS www.aidsindonesia.or.id, newspapers, face-to-face communication, online newspapers, telephones, and Coordination Meeting.

Keywords: Communication Strategy, Prevention, Communication Planning Model by Philip Lesly.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi hubungan masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi ini berjudul “Strategi Komunikasi Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Banten”.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun diharapkan sekali guna memperbaiki skripsi ini. Keberhasilan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak berupa do'a, dukungan, motivasi, serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Dr. Rahmi Winangsih, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Darwis Sagita, M.Ikom., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ibu Neka Fitriyah, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Muhammad Jaiz, S.Sos., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat.

7. Bapak Ail Muldi, M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang sangat membantu penulis mulai dari konsep penelitian hingga penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Seluruh informan di dalam Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara.
10. Ibu Hj. Aliyah selaku Ibu tersayang saya, Elida Chaerunissa selaku kakak perempuan sekaligus donatur terbesar saya, dan tak lupa Riyan Jannata selaku kakak laki-laki saya tercinta. Tanpa doa dan dukungan kalian, saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Cirebon, khususnya Nok Nurul, yang selalu memotivasi saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dari orok saya, Andin, Mbot, Ghina yang selalu ada untuk saya dikala saya sedang jenuh dengan penyusunan skripsi dan selalu menanyakan kapan wisuda. Tanpa kalian aku nothing.
13. Cilegon Squad, anggotanya yaitu Annisa Pinki, Suciati Farhanas yang selalu menemani saya untuk mencari data dari pagi hingga malam hari.
14. Amaniyah selaku sahabat perhumasan yang selalu ada untuk menemani saya dalam mengurus skripsi dan selalu memberi semangat kepada saya. You dont know how much I love you, mi. Sarangheyo!
15. Sahabat-sahabat Kesebelasan, diantaranya ada Mega, Meriani, Deta, Riri, Raski, Ririn, Mantit, Abeng yang selalu menghibur saya, memotivasi saya. Kutunggu kalian On Top ya!!
16. Seluruh angkatan 2014 yang senantiasa membagikan informasi ter-update seputar perkuliahan.
17. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis sampaikan selain terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan

pihak-pihak diatas. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi siapapun yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 4 Juli 2018

Trina Dhamartika

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Identifikasi Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Komunikasi	13
2.2 Komponen-Komponen Komunikasi	15
2.3 Strategi Komunikasi.....	17

2.3.1 Strategi Penyusunan Pesan.....	20
2.3.2 Strategi Menetapkan Komunikator	20
2.3.3 Strategi Penentuan <i>Phisycal Context</i>	21
2.3.4 Strategi dalam Pencapaian Efek.....	21
2.4 Strategi Komunikasi dalam Penyusunan Pesan	22
2.5 Mengenal HIV/AIDS	25
2.6 Pencegahan HIV/AIDS	27
2.7 Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly	29
2.8 Kerangka Berpikir.....	32
2.9 Penelitian Terdahulu	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Paradigma Peneletian	42
3.3 Fokus Penelitian.....	44
3.4 Lokasi Penelitian.....	44
3.5 Instrumen Penelitian.....	45
3.6 Teknik Pemilihan Informan	46
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7.1 Wawancara.....	48
3.7.2 Observasi atau Pengamatan.....	50
3.7.3 Studi Dokumen.....	51
3.8 Teknik Analisis Data.....	52
3.9 Uji Keabsahan Data.....	54
3.10 Jadwal Penelitian.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	58
4.2 Deskripsi Subjek Penelitian	59
4.2.1 Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.....	64
4.2.2 Susunan Sekretariat Pengurus Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten Periode 2016-2018.....	65
4.3 Kegiatan Pencegahan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten	67
4.3.1 Kegiatan Pencegahan dengan Program Warga Peduli AIDS.....	67
4.3.2 Kegiatan Pencegahan melalui Program <i>Harm Reduction</i>	69
4.3.3 Koordinasi dengan Instansi	70
4.4 Hasil Penelitian	70
4.4.1 Tahapan analisis dan riset pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, <i>Harm Reduction</i> , dan Koordinasi dengan Instansi	72
4.4.2 Tahapan perumusan kebijakan pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, <i>Harm Reduction</i> , dan Koordinasi dengan Instansi	77
4.4.3 Tahapan perencanaan program pelaksanaan pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, <i>Harm Reduction</i> , dan Koordinasi dengan Instansi.....	82
4.4.4 Tahapan kegiatan komunikasi pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, <i>Harm Reduction</i> , dan Koordinasi dengan Instansi	84
4.5 Pembahasan.....	92
4.5.1 Tahapan Analisis dan riset dengan mendiagnosa, mengidentifikasi permasalahan, dan peninjauan kegiatan sebelumnya.....	95
4.5.2 Tahapan perumusan kebijakan dengan penyusunan strategi	99

4.5.3 Tahapan perencanaan program pelaksanaan dengan perencanaan mengenai fasilitas, tenaga, dana, dan sasaran	101
4.5.4 Tahapan kegiatan komunikasi dengan penentuan saluran komunikasi...	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran.....	111
5.2.1 Saran Teoritis	111
5.2.2 Saran Praktis.....	112

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	116
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly	30
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1 Aliran pendistribusian informasi pada Program <i>Harm Reduction</i>	88
Gambar 4.2 Proses komunikasi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi.....	91
Gambar 4.3 Proses Perencanaan Kegiatan Pencegahan HIV/AIDS Komisi Penanggulangan AIDS dengan pengimplementasian analisis Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	117
Lampiran 2	118
Lampiran 3	119
Lampiran 4	120
Lampiran 5	124
Lampiran 6	132
Lampiran 7	134
Lampiran 8	136
Lampiran 9	139
Lampiran 10	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi menjadi salah satu yang dibutuhkan dari segala aktivitas yang dilakukan di dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosialnya maupun dengan dirinya sendiri. Pada hakikatnya, komunikasi merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan informasi atau pesan. Dalam suatu organisasi, kegiatan komunikasi menjadi ujung tombak untuk menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupan organisasinya.

Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh kemampuannya, penerima pesan menyampaikan pesan itu kepadanya. Selama tidak ada gangguan atau *noise*, komunikasi akan berjalan lancar dan efektif (Hardjana, 2003:11). Pada dasarnya di dalam sebuah proses komunikasi, suatu hambatan adalah hal yang biasa terjadi dan hal itu dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu komunikasi.

Tanpa adanya komunikasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dan tidak akan pernah bisa mencapai suatu tujuan organisasi. Suatu keberhasilan program dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh individu-individu di dalamnya. Suatu organisasi bergantung pada bagaimana

komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya dengan tujuan membentuk fokus kerja yang baik untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang sedikit berbeda dengan organisasi biasa. Organisasi pemerintah dituntut untuk sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Organisasi pemerintah dibuat berdasarkan situasional yang ada di kehidupan sosial dan memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Salah satu organisasi yang dibuat oleh pemerintah adalah Komisi Penanggulangan AIDS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan bahwa untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten/Kota perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sampai ke level Distrik/Kota. Pembentukan KPA, mempunyai enam tugas pokok dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Kemudian dalam peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 mengamanatkan pembentukan KPA Nasional, Provinsi, dan Kabupaten beserta sekretariatnya dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan bertanggung jawab kepada kepala wilayah. Pemerintah telah menugaskan kepada Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat administrasi untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya

penanggulangan AIDS di tanah air dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang melandasi kerja Komisi.

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. HIV merupakan penyakit yang sampai saat ini masih belum ditemukan obat penawarnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Infection and Immunity* di *St. George Hospital Medical School*, London, sudah ditemukan obat yang dapat mengurangi tingkat HIV, tetapi belum dapat membunuh virus HIV sepenuhnya (Martha, 2016).

Sedangkan AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh manusia. Karena kekebalan tubuh yang terus menurun akan mengakibatkan penyakit lainnya mudah masuk seperti TBC, paru-paru, saluran pencernaan, otak dan kanker. Jika sudah masuk pada tahap AIDS, penderitanya akan berbeda dengan orang normal lainnya dan akan dipisahkan dari masyarakat. ODHA atau orang dengan HIV&AIDS adalah salah satu target sasaran dan memiliki peranan dalam segala aktifitas penanggulangan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (Jempormase, 2017).

Berdasarkan dari laporan tahun ke tahun, kasus HIV/AIDS masih menjadi musuh besar yang menakutkan di Indonesia. Di Provinsi Banten, terdapat 3.526 kasus HIV. Menurut data Kumulatif Kasus HIV berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sampai dengan September 2017 kasus

dengan jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 1.073 kasus. Sedangkan yang terendah yaitu di Pandeglang dengan jumlah 93 kasus. Kota Serang sebagai Ibu kota Provinsi Banten sendiri menduduki peringkat ke-7 dengan 112 kasus HIV (Kementerian Kesehatan, 2017).

Kasus AIDS di Provinsi Banten, merujuk pada data Kumulatif Kasus AIDS berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sampai dengan September 2017, yaitu terdapat sebanyak 1.871 kasus. Jumlah kasus AIDS tertinggi terdapat di Kota Tangerang yaitu dengan jumlah 509 kasus. Sedangkan yang terendah terdapat di daerah Lebak dengan jumlah 113 kasus (Kementerian Kesehatan, 2017). Dengan adanya data tersebut telah membuktikan bahwa penyebaran penyakit HIV dan AIDS telah menyebar di seluruh wilayah di Provinsi Banten dengan jumlah terbesar terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Dengan jumlah kasus HIV yang masih terbilang banyak tersebut seharusnya membuat pemerintah harus lebih memfokuskan pada menekan jumlah kasus HIV/AIDS supaya tidak meningkat tiap tahunnya.

Populasi kunci atau populasi yang beresiko tinggi terserang HIV&AIDS menurut data Populasi Kunci berdasarkan Estimasi Kementerian Kesehatan Tahun 2012 telah mencapai 8.393 orang. Populasi Kunci adalah populasi yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi terserang virus HIV/AIDS. Pada umumnya tersebar dalam beberapa kategori, yakni pekerja seks, pengguna napza jarum suntik, LSL (Lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki lain), dan waria. Populasi

kunci sendiri tersebar di 8 wilayah Provinsi Banten diantaranya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Untuk populasi kunci LSL di Provinsi Banten berjumlah 38.209 orang, WPS-TL (Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung) berjumlah 1.365, Pelanggan WPS-TL berjumlah 13.503, WPS-L (Wanita Pekerja Seks Langsung) berjumlah 2.798, Pelanggan WPS-L berjumlah 47.819, Waria berjumlah 1.337, Pelanggan Waria berjumlah 9.171, dan Penasun (Pengguna Napza Suntik) berjumlah 1.378 (Kementerian Kesehatan, 2012). Dengan adanya populasi kunci ini telah membuat Komisi Penanggulangan AIDS untuk melakukan tindakan agar status populasi kunci tidak berubah menjadi ODHA.

Kehidupan ODHA merupakan suatu permasalahan yang terbilang kompleks. Permasalahan yang ikut bersangkutan di dalamnya ialah permasalahan psikososial, ekonomi, dan pendidikan. Permasalahan psikososial berkaitan dengan konsep diri bahwa ODHA berbeda dengan orang normal lainnya dan akan ada penolakan dari masyarakat. Lalu dari segi permasalahan ekonomi, tidak sedikit orang yang sudah terinfeksi HIV diberhentikan dari pekerjaannya. Dan di dalam permasalahan pendidikan, mereka yang tidak memiliki informasi pada umumnya adalah alasan mengapa mereka bisa tertular.

Dengan melihat kondisi diatas, kita sadar akan pentingnya peranan Komisi Penanggulangan AIDS di tengah-tengah masyarakat. Secara

fungsional, komisi Penanggulangan AIDS merupakan lembaga koordinasi yang mengkoordinir dinas-dinas terkait dan masyarakat serta berperan untuk mendorong kebutuhan ODHA di masyarakat seperti program penanggulangan HIV secara komprehensif. Selain hal-hal tersebut, KPA juga mempunyai tugas yang ikut berpengaruh terhadap pola kehidupan ODHA, yaitu menguatkan komunitas-komunitas yang bergerak di bidang HIV agar mempunyai kapasitas untuk membantu proram penanggulangan HIV&AIDS. Karena komunitas-komunitas yang bergerak di bidang HIV mempunyai fokus tujuan yang lebih tersasar pada hal psikologis dan sosiologis ODHA, khususnya yang baru terinfeksi HIV/AIDS (Jempormase, 2017).

Komisi Penanggulangan AIDS yang memiliki tujuan pokok dalam penanggulangan yaitu pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, dan pengendalian bahaya AIDS. Suatu kegiatan yang merupakan tindakan awal dan penting untuk dilakukan adalah 'pencegahan'. Pencegahan yang telah menjadi salah satu kegiatan pokok dalam penanggulangan AIDS merupakan kegiatan untuk menekan jumlah kasus HIV dan AIDS yang semakin meningkat dari tahun-ke-tahunnya, sesuai dengan tujuan dari KPA yaitu tidak adanya lagi ODHA baru.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi, KPA tentunya tidak bisa dilakukan oleh KPA sendiri, tetapi banyak pihak yang harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pemerintah dan masyarakat. Inilah yang menjadi peran KPA untuk

melakukan strategi komunikasi terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat dalam hal pencegahan HIV AIDS.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyangkut penanggulangan penyakit HIV/AIDS di dalam masyarakat adalah masalah interaksi antar instansi pemerintah yang menyangkut dalam permasalahan HIV/AIDS. Interaksi dan aliran informasi yang terjadi antar instansi dapat berdampak pada jalannya pembangunan masyarakat khususnya ODHA yang perlu diarahkan sehingga dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dengan proses komunikasi dan penyampaian pesan yang baik, akan dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi pembangunan yang seharusnya berisi usaha untuk membuat program-program pencegahan dan memberdayakan mereka yang positif terinfeksi HIV/AIDS sehingga mereka dapat hidup layak tanpa harus menerima stigma jelek dari masyarakat.

Penanggulangan terhadap penyakit HIV AIDS merupakan suatu program kerja yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS. Untuk mengerakkan agar program-program penanggulangan khususnya pencegahan dapat berjalan yaitu salah satunya dengan penggunaan komunikasi yang efektif. Pada dasarnya komunikasi mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan di dalam suatu organisasi. Pengelolaan terhadap komunikasi merupakan aspek penting yang turut ikut andil dalam proses mencapai tujuan organisasi.

Didirikannya sebuah organisasi pemerintahan seperti KPA dianggap penting dalam hal penanganan terhadap AIDS. Dilihat dari strategi

komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Samarinda dalam penelitian yang dilakukan oleh Auliani (2017), komunikasi yang dilakukan dalam pencegahan terhadap HIV yaitu dengan sosialisasi, layanan komunikasi publik, dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Strategi komunikasi yang dilakukan KPA Kota Samarinda lebih menargetkan para pelajar dan orang-orang yang masih awam dengan penyakit HIV AIDS dan bukan menargetkan populasi kunci atau orang yang melakukan perilaku beresiko.

Komisi Penanggulangan AIDS yang dilakukan di daerah lain memiliki target sasaran yang berbeda-beda, sesuai dengan situasi yang terdapat di wilayah lain. Strategi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda lebih bersifat preventif yang artinya sosialisasi dilakukan dengan melakukan pencegahan sejak dini kepada masyarakat. Namun kegiatan sosialisasi terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain sosialisasi, penggunaan media juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan KPA Kota Samarinda yaitu dengan adanya Layanan Komunikasi Publik.

Komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda dalam melakukan strategi komunikasi dalam sosialisasi HIV/AIDS berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015) yaitu dilakukan dengan perencanaan pemilihan komunikator, komunikan, saluran dan media komunikasi, frekuensi, waktu dan tempat, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi komunikasi.

Pada dasarnya strategi komunikasi merupakan suatu perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan komunikasi. Salah satu model perencanaan dalam strategi komunikasi adalah model Philip Lesly yang menjelaskan mengenai strategi perencanaan komunikasi dengan dua komponen utama yaitu organisasi dan publik. Kedua komponen tersebut mempunyai tahapan-tahapan yang diantaranya ialah Analisis dan Riset, Perumusan Kebijakan, Perencanaan program pelaksanaan, Kegiatan Komunikasi, Umpan balik, dan Evaluasi (Cangara, 2014:74). Komponen dari perencanaan komunikasi tersebut membantu sebuah organisasi di dalam menyusun strategi komunikasi dalam kegiatan komunikasi yang ingin dilakukan.

Strategi komunikasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Penyebaran pesan atau informasi sangat diperlukan bagi informasi, karena suatu program tidak akan berjalan tanpa adanya suatu strategi komunikasi. Suatu strategi komunikasi merupakan hal terpenting yang harus dilakukan guna menyampaikan pesan atau informasi kepada publik.

Organisasi pemerintahan dinilai mempunyai pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena-fenomena sosial sehingga hal tersebut telah menuntut mereka untuk bisa melakukan perencanaan komunikasi yang terstruktur sehingga tujuan yang akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat banyak bisa tercapai. Prinsip utama dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten adalah menanggulangi fenomena

AIDS di Provinsi Banten yang salah satunya adalah pencegahan. Diharapkan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan KPA mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HIV/AIDS sehingga masyarakat sadar dengan sendirinya untuk berpola hidup sehat dan penyebaran HIV/AIDS dapat dicegah. Untuk tercapainya hal tersebut, tentunya diperlukan strategi komunikasi dalam kegiatan pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten.

Melihat beberapa strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS di wilayah lain membuat peneliti ingin lebih mengetahui mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dalam hal pencegahan HIV/AIDS khususnya di Provinsi Banten. Suatu strategi komunikasi yang dirancang, dirumuskan, dan dipilih sebelum pelaksanaan kegiatan. Mengingat strategi komunikasi memegang peranan penting dalam upaya penyampaian informasi saat melakukan kegiatan pencegahan. Dari penjelasan permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dalam pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di simpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Strategi Komunikasi Dalam Pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dengan menggunakan Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly?”

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis dan riset pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten?
2. Bagaimana perumusan kebijakan pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten?
3. Bagaimana perencanaan program pelaksanaan pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten?
4. Bagaimana kegiatan komunikasi pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten?

1.4 Tujuan Peneleitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis dan riset pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten.

2. Mengetahui perumusan kebijakan pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten.
3. Mengetahui perencanaan program pelaksanaan pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten.
4. Mengetahui kegiatan komunikasi pada perencanaan strategi komunikasi dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti Ilmu Komunikasi dan menambah pengetahuan baru khususnya mengenai jaringan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Serta dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi calon peneliti yang berkeinginan untuk mengambil studi mengenai komunikasi umum yang berkaitan dengan strategi komunikasi dan menjadi perbandingan bagi calon peneliti yang akan membuat penelitian di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat luas mengenai penyakit HIV/AIDS dan pencegahannya, karena fenomena ini sangat berhubungan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Serta memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan seputar penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Komunikasi

Sehubungan dengan kenyataan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas seorang manusia, tentu masing-masing orang mempunyai cara sendiri, tujuan apa yang akan didapatkan dalam komunikasinya. Jika ditinjau dari pola komunikasinya, ada sistem komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.

Tinjauan mengenai komunikasi, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan hal yang selalu melekat pada manusia, terlebih lagi di dalam kehidupan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Interaksi yang terjalin antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat disebut sebagai komunikasi. Segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari unsur komunikasi. Komunikasi merupakan sarana dalam proses penyampaian pesan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) untuk memberitahukan atau merubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung, secara lisan maupun secara tidak langsung dengan media sebagai sarannya (Effendy, 1997:9).

Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya,

dan berbagai peluang untuk memberikan umpan balik segera (Bitter dalam Wiryanto, 2004:32). Secara sederhana dapat diartikan bahwa proses komunikasi akan terjadi apabila pengirim menyampaikan informasi berupa *verbal* ataupun *non verbal* kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia ataupun dengan medium tulisan.

Suatu komunikasi yang baik dapat terjadi jika dalam prosesnya menggunakan teknik berkomunikasi yang baik pula. Teknik berkomunikasi adalah cara atau “seni” penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa, sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan (Effendy, 2008:6). Pesan yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya memungkinkan komunikan akan lebih memahami bahkan menimbulkan rasa empati di dalam dirinya.

Definisi komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian pesan yang sederhana. Komunikasi adalah suatu proses dinamik transaksional yang mempengaruhi perilaku sumber dan penerimanya dengan sengaja menyandi (*to code*) perilaku mereka untuk menghasilkan pesan yang mereka salurkan lewat suatu saluran (*channel*) guna merangsang atau memperoleh sikap atau perilaku tertentu (Mulyana & Rakhmat, 2010:14). Hal tersebut dapat diartikan bahwa suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator akan berhasil jika penerima pesan dapat menyerap perilaku dan terpengaruh oleh isi pesan yang disampaikan.

Secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana di dalamnya terjadi pertukaran pesan yang merujuk kepada suatu

tujuan atau demi mendapatkan respon. Pertukaran pesan terjadi karena adanya suatu saluran komunikasi sebagai penghantar pesan agar pesan dapat sampai kepada komunikan.

2.2 Komponen-Komponen Komunikasi

Praktek dalam berkomunikasi tidak terlepas dari beberapa komponen-komponen di dalamnya. Komponen-komponen komunikasi terdiri dari (Sihabudin & Winangsih, 2012:37):

a. Komunikator

Komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan.

Seorang komunikator yang baik harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki kredibilitas tinggi, artinya memiliki keahlian atau kemampuan dan tingkat kesesuaian tinggi dengan topik yang dibicarakan.
2. Memiliki tingkat kepercayaan, dalam arti seorang komunikator dipercaya oleh khalayak, karena didukung oleh unsur kredibilitas, disamping perilaku jujur. Serta kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator.
3. Memiliki kesamaan tinggi dengan komunikan, baik dari aspek bahasa, tempat tinggal, kelas sosial, dan sebagainya.
4. Memiliki penampilan menarik, khususnya dari segi fisik. Apabila sumber di nilai “menarik” oleh penerima maka proses

komunikasi akan lebih cepat berhasil karena adanya proses identifikasi dalam diri pihak penerima

5. Mamiliki kekuatan dan kekuasaan, yang diantaranya adalah karisma, wibawa otoritas, kompetensi atau keahlian, dan pemenuhan

b. Pesan (*Message*)

Pesan merupakan sekumpulan simbol komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Simbol atau lambang dapat bersifat verbal atau nonverbal. Komunikasi verbal yaitu penyampaian pesan dalam bentuk lisan atau tulisan, sedangkan nonverbal merupakan penyampaian pesan melalui bahasa tubuh seperti gerak-gerik, isyarat, raut wajah, dan lainnya. Dalam mengemas pesan, ada tiga hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Isi pesan, materi dan pesan tersebut
2. Struktur pesan, yaitu bagaimana pesan tersebut disusun untuk memperoleh efek maksimal
3. Format pesan, yaitu bagaimana pesan disusun dalam gabungan pesan verbal dan nonverbal sehingga efeknya lebih baik. Format pesan lebih menekankan kepada gaya penyajian pesan.

c. Media

Media atau saluran adalah alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikannya. Kriteria media massa harus memenuhi persyaratan, diantaranya yaitu:

- a. Aktualitas. Isi media berupa informasi terbaru dan diperlukan *audience*. Jarak dari peristiwa dengan penyampaian pesan masih baru dan hangat.
 - b. Universalitas. Pesan disampaikan tidak terbatas pada hal khusus, tetapi menyangkut kepada banyak persoalan
 - c. Publisitas. Informasi disebarakan untuk umum dan semua golongan dan kelompok
 - d. Periodisitas. Informasi disampaikan teratur waktunya.
 - e. Kontinuitas. Media menyampaikan isi pernyataan berkesinambungan.
- d. Komunikasikan

Komunikasikan merupakan sasaran pesan komunikasi. Komunikasikan merupakan penerima pesan komunikasi. Komunikasikan merupakan unsur komunikasi yang sangat penting karena keberhasilan komunikasi banyak ditentukan oleh komunikasikan. Suatu komunikasi dikatakan berhasil apabila komunikator berhasil melakukan perubahan pada diri komunikasikan sesuai dengan tujuan komunikator menyampaikan pesan tersebut.

2.3 Strategi Komunikasi

Strategi dalam pengertian umum disebut sebagai taktik. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication*

management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi (Effendy, 2008:29).

Berdasarkan uraian pengertian diatas, dapat diartikan bahwa sebuah strategi penting untuk dilakukan karena strategi adalah perencanaan awal yang terstruktur dari seluruh tindakan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan strategi yang telah tersusun, akan memudahkan suatu organisasi menetapkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, sehingga perubahan yang terjadi dapat terlihat. Oleh karena itu, suatu strategi komunikasi dalam sebuah organisasi juga dapat menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi efektif yang dilakukan.

Sama halnya dengan Komisi Penanggulangan AIDS yang memiliki tujuan pokok dalam penanggulangan yaitu pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, dan pengendalian bahaya AIDS. Demi mencapai tujuan yang menjadi acuan pokok dari anggota-anggota KPA Provinsi Banten yang telah mendedikasikan dirinya sebagai agen perubahan untuk permasalahan AIDS, mereka juga memerlukan strategi dalam melakukan komunikasi penyuluhan agar *audience* atau komunikan dapat menerima pesan dan tertarik untuk sekedar mengetahui pesan yang disampaikan tersebut.

Strategi komunikasi, baik secara makro (*planned multimedia strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) mempunyai fungsi ganda (Effendy, 2008:28):

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal
2. Menjembatani “kesenjangan budaya” (*cultural gap*)

Suatu strategi komunikasi dapat mempengaruhi suatu keberhasilan kegiatan komunikasi yang menjadi tujuan. Dalam menyusun strategi komunikasi, seorang pemimpin harus memahami fungsi strategi komunikasi secara makro maupun mikro. Dengan memahami fungsi secara makro, berarti organisasi dipandang struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan dengan memahami fungsi secara mikro, komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi lebih difokuskan kepada komunikasi dalam unit dan sub unit. Komunikasi yang dapat dilakukan pada tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk memberi orientasi dan latihan, komunikasi untuk menjaga iklim, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan dan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan dalam bekerja (Firdaus, 2008:75-76).

Strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi (Cangara, 2014:66). Dalam hal ini, strategi komunikasi menjadi salah satu bagian dari perencanaan komunikasi. Strategi komunikasi dilakukan setelah adanya suatu perencanaan

komunikasi berdasarkan kebijakan komunikasi yang telah dibuat. Jika disusun, dimulai dari adanya kebijakan komunikasi, lalu perencanaan komunikasi dirancang, kemudian dilanjutkan dengan taktik melalui strategi komunikasi, dan yang terakhir adalah operasional atau pelaksanaannya.

Aspek – aspek strategi komunikasi menurut Arifin (1994:51) dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Strategi Penyusunan Pesan

Perumusan dan strategi penyampaian pesan merupakan suatu kegiatan penting yang harus dilakukan dalam perencanaan strategi komunikasi. Pesan yang disampaikan harus tepat pada sasaran. Untuk dapat menyampaikan dan menciptakan pesan yang dapat diterima oleh sasaran dari komunikasi, maka isi pesan harus sesuai dengan kerangka referensi (*frame of reference*) dan kerangka pengalaman (*field of experience*) yaitu merupakan kerangka psikhis yang menyangkut pandangan, pedoman dan perasaan dari komunikan yang bersangkutan (Effendy, 1998:41).

2.3.2 Strategi Menetapkan Komunikator

Komunikator dalam kegiatan komunikasi sangat berpengaruh bagi kelancaran komunikasi itu sendiri. Begitu penting dan dominannya peranan komunikator sehingga dalam suatu kegiatan komunikasi yang terencana dibutuhkan strategi untuk menetapkan komunikator yang tepat. Komunikator tersebut harus memiliki kredibilitas di mata komunikan. Kredibilitas tersebut dapat diperoleh

apabila komunikator tersebut memiliki keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, berpengetahuan luas, bersahabat, serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya

2.3.3 Strategi Penentuan *Physical Context*

Physical Context berkaitan dengan tempat atau lokasi (*place*) serta waktu (*time*). Penetapan tempat dan waktu memiliki pengaruh yang besar dalam kesuksesan komunikasi. Pemilihan tempat dan waktu yang tidak tepat akan membuat efek yang diinginkan susah untuk dicapai, bahkan mungkin akan merusak komunikasi secara keseluruhan. Penetapan lokasi yang tepat pada pelaksanaan komunikasi berimplikasi pada kemungkinan terjadinya penciptaan efek yang diinginkan. Pemilihan waktu yang berbeda, apakah pagi hari, siang hari, malam hari, dan juga lokasi yang berbeda, semuanya akan memberikan efek yang berbeda-beda.

2.3.4 Strategi dalam Pencapaian Efek

Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi. Perubahan sikap dan pembentukan opini adalah merupakan salah satu dari efek komunikasi. Tentunya pengaruh efek akan terasa berbeda-beda bagi tiap orang. Efek dari komunikasi dapat diketahui dari pergeseran pandangan atau perhatian, atau sikapnya terhadap kita atau terhadap suatu masalah yang sedang menjadi perhatian. Atau secara positif, efek tersebut bisa dilihat pada misalnya sebuah negara setelah melalui proses komunikasi yang terencana, menunjukkan gejala

makin erat hubungannya dengan kita atau memperlihatkan sokongan ataupun kerjasamanya dengan kita.

2.4 Strategi Komunikasi dalam Penyusunan Pesan

Pesan merupakan unsur pokok dari komunikasi yang mempunyai kedudukan yang sentral. Pesan yang dikomunikasikan mengharapkan respon positif untuk menunjukkan komunikasi tersebut efektif. Pesan adalah sebagai keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan (Widjaja, 2000:32).

Secara terminologi komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan atau pesan dari seseorang kepada orang lain dengan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa komunikasi akan berhasil jika timbul adanya saling pengertian antara kedua belah pihak, si pemberi informasi, maupun si penerima informasi. Selain itu, agar pesan mengenai tepat pada sasaran harus memenuhi syarat-syarat (Widjaja, 2000:33-34):

- a. Umum, yakni berisi hal hal umum yang dipahami oleh komunikan, bukan hanya dipahami oleh seseorang atau kelompok tertentu
- b. Jelas dan gamblang. Pesan haruslah jelas dan bukan samar-samar agar tidak ditafsirkan menyimpang dari yang kita maksudkan
- c. Bahasa yang jelas. Hindari penggunaan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh audiensi atau khalayak
- d. Positif. Secara kodrati manusia selalu tidak ingin mendengar dan hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya. Oleh karena itu setiap pesan agar diutarakan dalam bentuk positif. Kemukakan pesan untuk lebih mendapatkan simpati dan menarik

- e. Seimbang. Pesan yang disampaikan hendaklah tidak ekstrim dan tidak mempertentangkan dua kutub yang berbeda karena cenderung ditolak oleh komunikan.
- f. Sesuaikan dengan keinginan komunikan. Sasaran dari komunikasi yang kita lancarkan (komunikan) selalu mempunyai keinginan/kepentingan tertentu. Dalam hal ini komunikator dapat menyesuaikan dengan keadaan, waktu, dan tempat.

Pesan itu sendiri terdiri dari unsur isi pesan yakni perasaan dan pikiran komunikator serta lambing baik verbal maupun nonverbal sebagai alat mengungkapkan pikiran dan perasaan. Isi pesan biasanya dibalut dengan formulasi yang memudahkan penerimaan pesan, sementara wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus inti pesan itu sendiri. Dalam menyampaikan suatu pesan perlu diketahui beberapa hal, yaitu (Effendy, 2000:38):

- a. *Timing* yang tepat untuk suatu pesan
- b. Bahasa yang dipergunakan agar pesan dapat dimengerti
- c. Sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif
- d. Jenis sasaran di mana komunikasi akan dilaksanakan

Dalam menentukan tema dan materi atau isi pesan yang dilontarkan kepada khalayak sesuai dengan kondisinya, dikenal dua bentuk penyajian permasalahannya yaitu yang bersifat *one side issue* (sepihak) dan *both sides issue* (kedua belah pihak). *One side issue* dimaksudkan penyajian masalah yang bersifat sepihak, yaitu hanya mengemukakan hal yang positif saja atau yang negatif saja kepada khalayak. Juga berarti dalam mempengaruhi khalayak permasalahan itu berisi konsepsi dari komunikator semata tanpa

mengusik pendapat-pendapat yang ada. Disamping itu, *One side issue* lebih kepada komunikate yang telah mengenal informasi itu sebelumnya, sehingga fungsinya adalah untuk memperkuat (*re-inforcement*) informasi yang telah ada.

Both sides issue adalah metode penyajian kedua belah pihak atau dua sisi dengan memaparkan baik buruknya suatu permasalahan. Metode ini lebih cocok kepada mereka yang lebih berpendidikan tinggi, dan mengetahui informasi namun bersifat oposisi. Metode ini juga ini juga lebih cocok digunakan untuk hal-hal yang kontroversial dan menimbulkan pro kontra.

Kejelasan pesan menjadi penting tatkala kita mengkomunikasikan sesuatu. Kejelasan pesan adalah adanya kesesuaian antara maksud dengan interpretasi penerima. Agar pesan dapat diterima dengan jelas, hindarkan kesalahan tata bahasa, karena bisa merusak arti dalam suatu kata. Dalam penyampaian pesan itu sendiri, baik secara lisan, tatap muka, langsung, ataupun menggunakan metode saluran, maka hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu (Liliweri, 1991:24):

- a. **Tata Bahasa**
Tata bahasa tidak lain antara lain aturan yang digunakan dalam berbahasa sebagai alat berkomunikasi. Aturan-aturan itu mengatur bagaimana setiap orang berbahasa secara baik dan benar sehingga dapat terjalin komunikasi. Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam berbahasa antara lain memilih kata dan menyusun kalimat yang baik dan benar, menggunakan ejaan yang tepat, memakai imbuhan yang beraturan.
- b. **Pengetahuan tentang orang lain**
Pengetahuan berbahasa dan menggunakannya dapat disesuaikan dengan santun terhadap siapa percakapan dilakukan. Mengenal

- orang lain penting supaya anda anda mampu memberi perbedaan dari cara apa kebiasaan berkomunikasi itu dilakukan.
- c. Pengetahuan tentang situasi
Setiap orang harus memperhatikan konteks situasi dalam berkomunikasi; situasi dalam hal ini tidak hanya menunjukkan tempat tetapi lebih dari itu, yakni suasana.

Suatu strategi penyusunan pesan perlu untuk diimplementasikan ke dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS. Pesan yang ingin disampaikan oleh KPA sebagai komunikator kepada masyarakat perlu memiliki taktik yang tersusun karena melihat kembali bahwa yang ingin dicapai oleh KPA adalah perubahan pola pikir. Untuk merubah pola pikir perlu adanya pengemasan pesan yang baik dan ada campuran komunikasi persuasif di dalamnya. Untuk itu strategi penyusunan pesan penting dalam melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat dalam hal pencegahan penyakit HIV/AIDS ini.

2.5 Mengenal HIV/AIDS

HIV dan AIDS merupakan suatu penyakit yang berbeda tetapi saling berhubungan. Seperti yang dijelaskan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten (2017) dalam brosurnya “Mengenal Penyakit IMS, HIV & AIDS, dijabarkan bahwa HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* yang artinya penyakit ini adalah penyakit yang berasal dari virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Virus yang telah berkembang ini jika dibiarkan tanpa adanya pengobatan rutin untuk menekan penyebarannya akan menyebabkan sistem kekebalan

tubuh akan menurun sehingga penyakit lain diluar HIV dapat mudah masuk. Kumpulan dari berbagai gejala penyakit akibat turunya kekebalan tubuh seseorang akibat HIV ini disebut dengan AIDS atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. AIDS akan timbul ketika seseorang sudah tidak lagi mempunyai sistem kekebalan tubuh karena sudah terinfeksi HIV dan penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya.

HIV/AIDS yang merupakan penyakit menular ini memiliki caranya sendiri dalam proses penularannya. Cara penularan HIV dapat dijabarkan dalam beberapa poin dibawah (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten, 2017):

1. Hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV.
2. Tranfusi darah yang tercemar HIV.
3. Penyalahgunaan Narkoba karena sebagian besar pengguna Narkoba cenderung menggunakan jarum suntik sebagai media pemakaiannya. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian sangat rentan terhadap penularan virus HIV/AIDS (tertular ataupun menularkan).
4. Ibu hamil positif HIV kepada anak yang dikandungnya.
5. Antenatal yaitu saat bayi masih berada di dalam rahim melalui plasenta.
6. Intranatal yaitu saat proses persalinan, bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina.
7. Postanatal yaitu setelah proses persalinan melalui air susu ibu.

Kemudian untuk media penularan HIV/AIDS sendiri dapat dispesifikasikan ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Aliran darah (dapat berbentuk luka)
2. Cairan sperma
3. Cairan vagina
4. Air Susu Ibu

Penyakit HIV/AIDS sendiri merupakan penyakit yang tidak mudah menular. Virus HIV tidak menular melalui kontak sentuhan seperti

berpegang tangan atau berpelukan, digigit nyamuk atau serangga lain, hubungan seks aman, berbagi makanan atau menggunakan peralatan makan bersama, menggunakan kamar mandi bersama, ataupun terpapar batuk atau bersin.

Sedangkan untuk spesifikasi orang-orang yang dapat tertular virus HIV adalah siapapun yang jika melakukan perilaku beresiko. Orang-orang yang melakukan perilaku beresiko ini secara umumnya adalah pekerja seks, pengguna napza jarum suntik, LSL (Lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki lain), dan waria. Penampilan luar tidak menjamin apakah orang tersebut terinfeksi HIV atau tidak. Orang yang terinfeksi HIV positif sering terlihat sehat dan merasa sehat. Jika belum melakukan tes HIV, orang dengan HIV positif tidak tahu bahwa dirinya sudah tertular HIV dan dapat menularkannya kepada orang lain. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian seseorang sudah tertular HIV atau tidak (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten, 2017).

2.6 Pencegahan HIV/AIDS

Salah satu aspek penting dalam kegiatan KPA Provinsi Banten adalah penanggulangan. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dianggap salah di masyarakat, dengan kata lain upaya

penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif (Komisi Penanggulangan AIDS, 2017).

Komisi Penanggulangan AIDS yang memiliki tujuan pokok dalam penanggulangan yaitu pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, dan pengendalian bahaya AIDS. Dalam penanggulangan HIV/AIDS, pencegahan adalah salah satu kegiatan utama yang menjadi tahap awal yang sekaligus menjadi tahap terpenting. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan atau informasi kepada seluruh masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan HIV/AIDS seperti seminar terbuka, penyebaran brosur atau poster-poster mengenai HIV/AIDS, ataupun penyebaran iklan di berbagai media massa. Penyuluhan atau penyebaran informasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada semua lapisan masyarakat agar dapat mengetahui bahaya AIDS.

Pada prinsipnya, pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan cara mencegah penularan HIV melalui perubahan perilaku seksual yang terkenal dengan istilah “ABCDE”, yaitu:

1. A (*Abstinent*)

Tidak melakukan hubungan seksual yang tidak sah. Jauhi seks sampai adanya pernikahan atau menjalin hubungan jangka panjang dengan pasangan.

2. B (*Be Faithful*)

Tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Bersikap saling setia dengan pasangan dalam hubungan perkawinan atau hubungan jangka panjang tetap.

3. *C (Use Condom)*

Pergunakan kondom saat melakukan hubungan seksual bila beresiko menularkan/tertular penyakit.

4. *D (Don't Use Drugs)*

Hindari penyalahgunaan narkoba atau napza.

5. *E (Education)*

Edukasi yaitu menyebarkan informasi yang benar tentang HIV/AIDS dalam setiap kesempatan (Philipine National AIDS Council, 2008).

Masih terdapat banyak masyarakat yang masih belum paham mengenai HIV/AIDS dan apa saja tindakan beresiko yang dapat menyebabkan penularan. Oleh karena itu banyak instansi-instansi kesehatan yang mengadakan penyuluhan demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV.

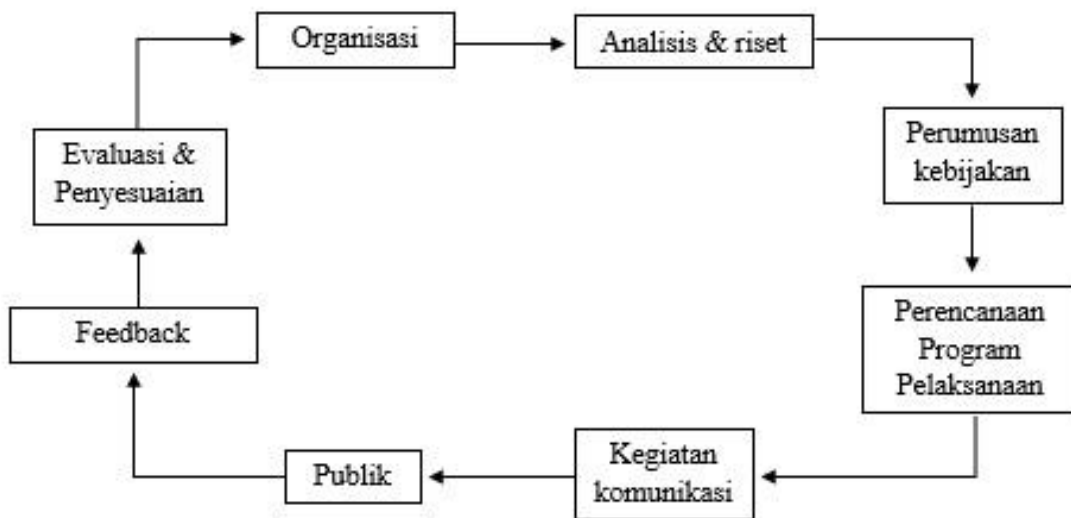
2.7 Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly

Model Perencanaan komunikasi yang dibuat oleh Philip Lesly menggambarkan bahwa perencanaan terbagi menjadi dua komponen utama, yakni Organisasi yang menggerakkan kegiatan dan Publik yang menjadi sasaran kegiatan (Cangara, 2014:74). Pada komponen Organisasi terdapat

empat tahapan sedangkan dalam komponen Publik terdapat dua tahapan yang harus dilakukan seorang perencana komunikasi.

Gambar 2.1

Gambar Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly



Sumber: Buku Perencanaan dan Strategi Komunikasi Cangara, 2014,

hlm. 74.

a. Organisasi

- 1) Analisis dan Riset
- 2) Perumusan Kebijakan
- 3) Perencanaan program pelaksanaan
- 4) Kegiatan Komunikasi

b. Publik

- 1) Umpan balik, dan
- 2) Evaluasi

Organisasi pengelola kegiatan bisa dalam bentuk lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, atau organisasi sosial. Organisasi atau lembaga seperti ini memerlukan tenaga spesialis yang bisa menangani masalah-masalah komunikasi, apakah itu untuk keperluan pencitraan, pemasaran, atau kegiatan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam komponen Organisasi maka langkah yang harus dilakukan adalah Analisis dan Riset, Perumusan Kebijakan, Perencanaan program pelaksanaan, dan Kegiatan Komunikasi.

Analisis dan riset dilakukan sebagai langkah awal untuk mendiagnosis atau mengetahui permasalahan yang dihadapi, sesudah itu perumusan kebijakan yang mencakup strategi yang akan digunakan. Pada tahap perencanaan pelaksanaan sudah ditetapkan sumber daya yang akan digerakkan, antara lain tenaga, dana, dan fasilitas, sedangkan pada tahap kegiatan komunikasi adalah tindakan yang harus dilakukan, yakni membuat dan menyebarkan informasi baik melalui media massa maupun melalui saluran-saluran komunikasi lainnya (kelompok, tradisional, media baru, *focus group*, publik) (Cangara, 2014:75).

Publik adalah komponen kedua yang menjadi sasaran kegiatan organisasi. Publik bisa bermacam-macam tergantung tipe kegiatan organisasi. Jika organisasi itu bergerak dalam bidang keagamaan maka publiknya adalah penganut agama tertentu dengan berbagai klasifikasi, misalnya pesantren, alim ulama, pengurus masjid, pengelola zakat, bank syariah, urusan haji dan semacamnya. Dalam komponen publik, langkah

yang harus diperhatikan adalah umpan balik dan evaluasi atau penyesuaian. Umpan balik dapat diketahui melalui riset dengan cara mendengarkan kuesioner, wawancara, atau melalui *focus group discussion*. Tujuannya untuk mengetahui pendapat, ide, keluhan, dan saran dari khalayak. Berdasarkan pendapat, ide, keluhan, dan saran dari khalayak tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan penyesuaian program yang akan dilakukan oleh organisasi atau lembaga pelaksana.

Komisi Penanggulangan AIDS adalah sebagai organisasi pemerintahan yang mempunyai publik sasaran yaitu ODHA atau Orang dengan HIV AIDS. Segala bentuk aktifitas komunikasi dalam hal perencanaan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh KPA. Publik yang menjadi sasaran atau ODHA berperan sebagai penerima dan pemberi nilai atas kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh KPA.

2.8 Kerangka Berpikir

Komisi penanggulangan AIDS adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi tugas khusus untuk menanggulangi permasalahan mengenai HIV dan AIDS. Banyak permasalahan yang harus ditangani oleh KPA, mulai dari meningkatkan upaya pencegahan, melakukan kegiatan penanggulangan yang efektif, hingga upaya untuk menghilangkan stigma buruk dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV AIDS).

Jumlah kasus HIV AIDS yang makin meningkat, banyaknya populasi kunci yang dikhawatikan akan berubah menjadi ODHA, dan permasalahan kehidupan ODHA yang makin kompleks dari segala aspek merupakan beberapa tugas pokok yang harus dilakukan oleh KPA. Penekanan jumlah kasus HIV dan AIDS menjadi salah satu fokus utama KPA dan untuk mencapai tujuan tersebut harus berawal dari penyusunan strategi komunikasi yang baik dan efektif.

Salah satu model perencanaan dalam strategi komunikasi adalah model perencanaan komunikasi Philip Lesly yang menjelaskan mengenai proses perencanaan komunikasi yang tersusun atas dua komponen yaitu organisasi dan publik. Komponen yang menjadi fokus peneliti adalah komponen organisasi yang terdiri dari tahapan analisis dan riset, perumusan kebijakan, perencanaan program pelaksanaan, kegiatan komunikasi.

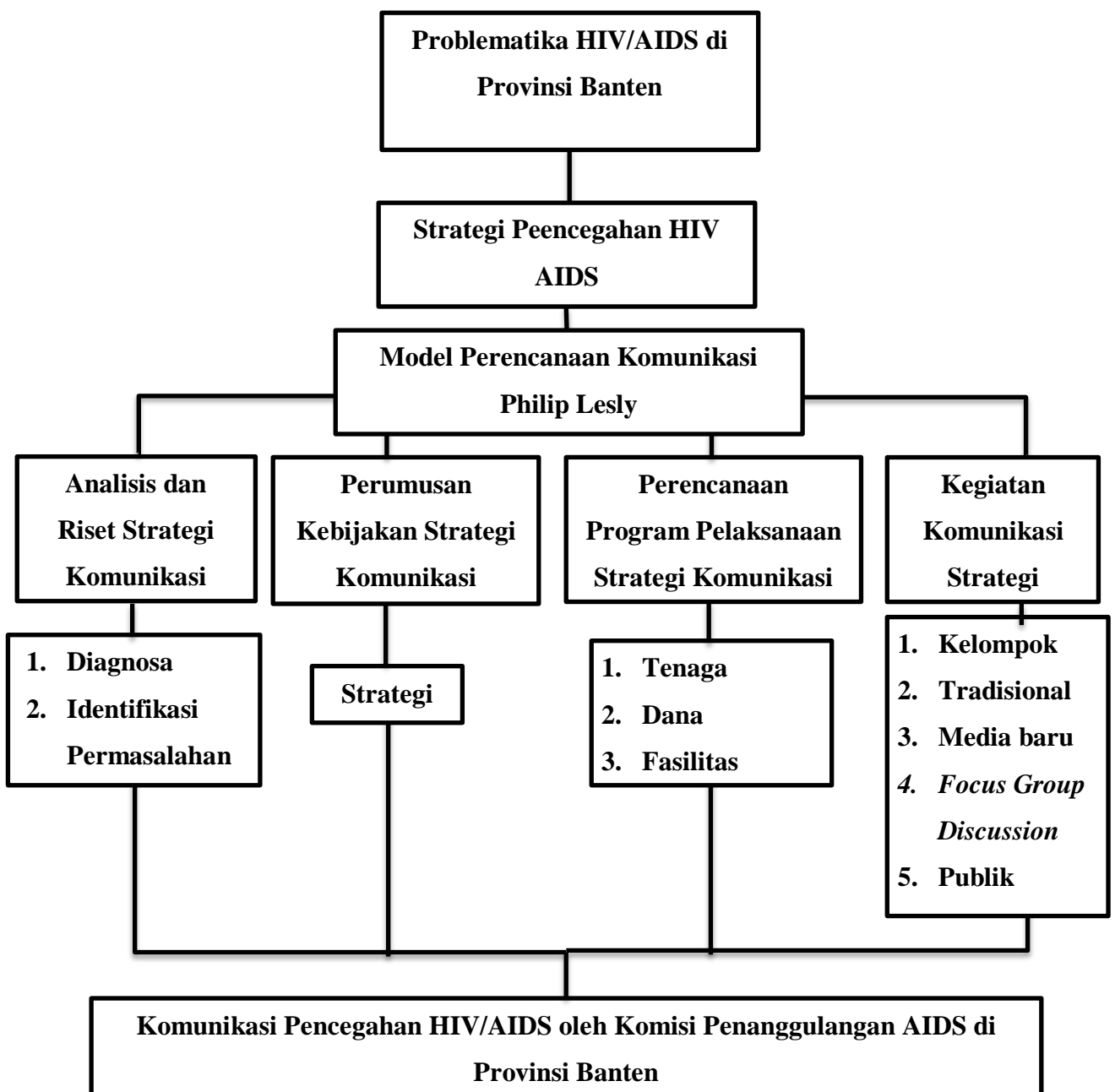
Tahapan-tahapan di dalam komponen organisasi memiliki indikator yang menjelaskan mengenai pengidentifikasian tahapan. Indikator pada tahapan analisis dan riset adalah diagnosa dan identifikasi permasalahan. Kemudian indikator pada tahapan perumusan kebijakan adalah strategi. Lalu indikator pada tahapan perencanaan program pelaksanaan adalah tenaga, dana, dan fasilitas. Dan yang terakhir, indikator pada tahapan kegiatan komunikasi adalah penggunaan saluran komunikasi kelompok, tradisional, media baru, *Focus Group Discussion*, dan publik.

Keempat tahapan tersebut dapat digunakan dalam menganalisis strategi komunikasi Pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan oleh Komisi

Penanggulangan AIDS di Provinsi Banten. Secara sederhana, berikut adalah gambaran kerangka berpikir dari konsep yang dibuat oleh peneliti:

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti. 2018.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam menambah pengetahuan mengenai fokus penelitian serta teori yang dipakai oleh penelitian sebelumnya. Dari penelitian terdahulu, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang memiliki fokus penelitian yang sama dengan penelitian ini. Peneliti membandingkan hasil penelitian satu dengan yang lainnya sebagai perbandingan dan bahan referensi.

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mia Auliani (2017), mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Mulawarman, dengan judul “Strategi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kota Samarinda”. Penelitian ini membahas mengenai strategi komisi Penanggulangan AIDS dalam melaksanakan pencegahan yang memfokuskan pada manajemen strategi komunikasinya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah strategi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam melakukan pencegahan HIV dan AIDS di Kota Samarinda dapat di lihat dari strategi KPA yaitu sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui cara pencegahan dan penularan penyakit ini, selanjutnya strategi KPA dengan melakukan layanan komunikasi publik agar masyarakat dapat mengetahui dengan mudah perkembangan HIV/AIDS di Kota Ssamarinda dan Kemudian strategi KPA melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait melalui rapat evaluasi, pertemuan kemitraan dan melakukan perencanaan

untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum yang rawan akan penyebaran HIV dan AIDS.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dan bagaimana strategi komunikasinya. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti ambil adalah penelitian ini hanya terfokus pada kegiatan yang telah dilakukan oleh KPA Kota Samarinda saja dan tidak ada unsur perencanaan komunikasi yang terstruktur di dalamnya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ariny Sartika (2015), mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, dengan judul “Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda”. Fokus penelitian Sartika lebih menganalisis tentang strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Sartika adalah sama-sama meneliti tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dan bagaimana strategi komunikasinya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti ambil yaitu terletak teori yang digunakan. Penelitian Sartika menggunakan Teori Difusi Inovasi dan Teori Hubungan Sosial sebagai dasar penelitian yang lebih memfokuskan pada kegiatan sosialisasi HIV/AIDS.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	ITEM	Mia Auliani	Ariny Sartika	Trina Dhamartika
1.	Judul	Strategi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kota Samarinda	Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda	Strategi Komunikasi dalam Pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten (Studi Deskriptif Kualitatif pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dengan menggunakan Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly)
2.	Tahun	2017	2015	2018
3.	Tujuan Penelitian	Mengetahui dan mendiskripsikan Strategi Komisi Penanggulangan AIDS dalam melaksanakan Pencegahan HIV/AIDS Di Kota Samarinda	Menganalisis tentang strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda	Meneliti tentang strategi komunikasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dalam pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten dengan menerapkan model perencanaan komunikasi Philip Lesly
4.	Teori	Manajemen Strategi Komunikasi	Teori Difusi Inovasi dan Teori Hubungan Sosial	Konsep Perencanaan Komunikasi Philip Lesly
5.	Metode	Metode deskriptif kualitatif	Metode deskriptif kualitatif	Metode deskriptif kualitatif
6.	Hasil Penelitian	Strategi yang di laksanakan oleh Komisi penanggulangan AIDS	KPA Kota Samarinda, dalam melakukan sosialisasi HIV/AIDS sudah menggunakan	

		<p>(KPA) dalam melakukan pencegahan HIV dan AIDS di Kota Samarinda dapat dilihat dari strategi KPA yaitu Sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui cara pencegahan dan penularan penyakit ini, selanjutnya strategi KPA dengan melakukan layanan komunikasi publik agar masyarakat dapat mengetahui dengan mudah perkembangan HIV/AIDS di Kota Samarinda dan kemudian strategi KPA melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait melalui rapat evaluasi, pertemuan kemitraan dan melakukan perencanaan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum yang rawan akan penyebaran HIV dan AIDS.</p>	<p>strategi komunikasi yang baik. Hal ini terlihat dari tanggapan komunikan yang bagus dan adanya penunjukan komunikator sesuai kompetensinya, melakukan pembedaan dalam mengemas pesan dan membuat media serta membagikannya menurut tipe komunikan, menggunakan frekuensi, menentukan waktu dan tempat kegiatan selama bersosialisasi serta melakukan pendekatan psikologis dengan tokoh masyarakat. Adanya sedikit hambatan pada pelaksanaan sosialisasi masih bisa diatasi oleh KPA. Untuk ke depannya, ada baiknya KPA meneruskan strategi yang baik ini dengan menambahkan inovasi baru dan memperbanyak kerja sama dengan stakeholders agar bisa melakukan sosialisasi melalui media massa serta mengajukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah Kota Samarinda.</p>	
7.	Persamaan	<p>Persamaan yang peneliti temukan adalah sama-sama meneliti tentang komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dan bagaimana strategi komunikasinya</p>	<p>Persamaan yang peneliti temukan dari penelitian Sartika adalah sama-sama meneliti tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dan bagaimana strategi komunikasinya</p>	<p>Sama-sama menganalisis strategi komunikasi pada kegiatan yang dilakukan organisasi dan proses komunikasi yang dilakukan di dalamnya</p>

8.	Perbedaan	Auliani meneliti Komisi Penanggulangan AIDS yang berada di Kota Samarinda dan penelitian ini hanya terfokus pada kegiatan yang telah dilakukan oleh KPA Kota Samarinda saja	Penelitian Sartika menggunakan Teori Difusi Inovasi dan Teori Hubungan Sosial sebagai dasar penelitian yang lebih memfokuskan pada kegiatan sosialisasi HIV/AIDS	Penelitian ini meneliti komunikasi organisasi dengan lokasi yang berbeda dengan penelitian di samping, dan menggunakan konsep dan teori yang berbeda pula.
9.	Sumber	Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi. Universitas Mulawarman.	Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi. Universitas Mulawarman.	Skripsi Program Studi Komunikasi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menemukan kebenaran dalam penelitiannya. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Penjelasan lain mengemukakan bahwa metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atau dengan kata lain sebagai pendekatan umum guna mengkaji suatu topic penelitian (Mulyana, 2004:16).

Pada dasarnya metode penelitian dibagi menjadi dua jenis, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan metode studi kasus dilakukan dengan cara menggunakan berbagai sumber data sebanyak mungkin yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2010:65).

Penelitian kualitatif pada hakikatnya tepat untuk penelitian sosial khususnya dalam bidang komunikasi karena kajian dalam metode penelitian

kualitatif lebih dalam guna mengetahui fenomena-fenomena tentang aspek-aspek kejiwaan, perilaku, sikap, tanggapan, opini, perasaan, keinginan dan kemauan seseorang atau kelompok (Ruslan, 2005:70).

Metode penelitian komunikasi dengan pendekatan deskriptif, ditujukan untuk; mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan ada waktu yang akan datang (Rakhmat, 2005:25).

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif pada dasarnya merupakan pendekatan subjektif. Manusia bukanlah suatu benda, melainkan dianggap bebas dan aktif dalam berperilaku dan memaknai realitas sosial yang merupakan hasil interaksi individu. Jika kaum objektif atau pendekatan kuantitatif memaknai realitas sosial dengan teratur, dapat diramalkan, dan relatif tetap, maka kaum subjektif akan memaknai realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat cair dan mudah berubah-ubah karena adanya interaksi sesama manusia, artinya individu-individu melakukan pemaknaan terhadap segala perilaku yang terjadi (Kriyantono, 2010:55).

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah karena tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi komunikasi yang termasuk ke dalam ranah penelitian kualitatif. Ranah yang dimaksud adalah dimana permasalahan yang diambil terbilang

luas dan kompleks tidak memungkinkan jika penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti tes, kuisioner, dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, peneliti juga ingin lebih mengetahui lebih luas dan mendalam mengenai bahasan penelitian dengan temuan informasi-informasi yang berhasil ditemukan di lapangan.

3.2 Paradigma Penelitian

Paradigman merupakan suatu pandangan untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menjadi pegangan kuat dalam diri penganut dan praktisinya. Paradigma menjadi alat bantu bagi ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa saja yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam mempresentasikan informasi yang diperoleh (Ardial, 2014:157-159). Paradigma juga bersifat *normative*, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang (Mulyana, 2003:9).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma postpositivis. Paradigma *postpositivisme* berpendapat bahwa berbicara bukan hanya yang terlihat, terasa dan teraba (seperti dalam paradigma positivis), tetapi mencoba memahami makna dibalik yang ada. Realitas sosial menurut pradigma ini adalah suatu gejala yang utuh yang terikat dengan konteks, bersifat kompleks, dinamis, dan penuh makna. Oleh karena

itu, mengetahui keberadaannya tidak dalam bentuk ukuran, akan tetapi dalam bentuk eksplorasi untuk dapat mendeskripsikannya secara utuh (Satori & Komariah, 2010:12). Penelitian yang ingin peneliti teliti adalah dengan tujuan untuk mengetahui secara terperinci dan terdeskripsi mengenai bagaimana strategi komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dalam kegiatan penyuluhan di Provinsi Banten.

Peneliti menggunakan paradigma *postpositivisme* karena peneliti ingin mendapatkan penjelasan terhadap proses komunikasi serta strategi komunikasi organisasi dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dalam menanggulangi fenomena AIDS di Provinsi Banten secara mendalam, tidak hanya mengacu kepada realitas yang ada, tetapi akan berkaitan dengan gambaran lain yang tidak terduga yang dapat hadir di dalam interaksi. Dengan perspektif *postpositivisme* yang dianut, peneliti tidak hanya melihat kehidupan sosial secara objektif, melainkan akan menggunakan cara berfikir subjektif dalam memandang realitas strategi komunikasi yang terjadi di dalam KPA Provinsi Banten. Peneliti juga akan melihat bahwa tiap individu yang terlibat akan memberikan pengaruh di dalam masyarakat dimana tindakan sosial yang dilakukan harus berhubungan dengan rasionalitas yang didapat melalui penafsiran dan pemahaman yang mendalam.

3.3 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian ini menjadi titik acuan utama dalam melakukan segala proses penelitian. Temuan fokus utama dilakukan dengan mencari permasalahan awal yang menjadi tema *general* atau umum di lokasi penelitian. Kemudian permasalahan tersebut dicerna kembali dengan keilmuan komunikasi. Selanjutnya dikaitkan dengan teori yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, lalu diambil garis yang menghubungkan antara permasalahan dengan teori yang diambil.

Secara umum, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dalam pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten dengan menggunakan model perencanaan komunikasi Philip Lesly. Secara khusus, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui strategi komunikasi dalam tahapan perencanaan komunikasi pada analisis dan riset, perumusan kebijakan, perencanaan program pelaksanaan, dan kegiatan komunikasi yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Keempat tahapan perencanaan strategi komunikasi tersebut juga menjadi aspek penting yang ingin diteliti di dalam aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh KPA Provinsi Banten.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten yang beralamat di Jl. KH. Amin Jasuta No. 15c

RT.02/08 Kaloran Baru, Kota Serang - Banten. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di kantor KPA Provinsi Banten adalah karena tempat ini telah menjadi pusat aktivitas komunikasi karyawan KPA Provinsi Banten dalam menjalankan berbagai aktivitas yang menyangkut pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto, 2006:160). Dapat dikatakan bahwa instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bahkan dimasukkan dalam kategori sebagai instrumen. Peneliti merupakan *key instrument* atau alat peneliti pertama (Prastowo, 2011:23). Dialah yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak terstruktur, seringkali menggunakan buku catatan. Manusialah yang sebenarnya hanya dapat memahami segala macam interaksi yang dilakukan antar-manusia, seperti wawancara, membaca gerak-gerik muka, serta memahami pesan yang terkandung di dalam ucapan maupun gerakan. Meskipun digunakan alat lain selain peneliti, seperti alat rekam atau kamera, seorang penelitilah yang tetap memegang peran utama sebagai alat penelitian.

3.6 Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Informan juga merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian (Elvinaro, 2010:61). Dengan demikian seorang informan haruslah memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan sampling purposif. Sampling purposif adalah teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Permasalahan utama di dalam menentukan kriteria yaitu adalah kriteria harus mendukung tujuan penelitian. Pada umumnya teknik purposif dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Menurut Spradley informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan (Spradley dalam Faisal, 1990:45), yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Informan penelitian pada dasarnya meliputi beberapa macam (Suyanto, 2005:172), yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Key Informan di dalam penelitian ini adalah Dr. Encep Mukardi, M.A.R.S selaku Sekretaris yang mengetahui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS di Provinsi Banten. Kemudian informan utama adalah Khaerunnisa, S.Ikom selaku Koordinator Bidang Administrasi Umum. Informan tambahan meliputi perwakilan dalam setiap bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS, diantaranya yaitu Koordinator Bidang Program, Koordinator Bidang Keuangan, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang pada Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu anggota OPD, dan Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Provinsi Banten sebagai salah satu anggota komunitas KPA Provinsi Banten.

Informan dalam penelitian haruslah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Keenam informan tersebut memiliki kepentingan dalam menentukan strategi

komunikasi yang dilakukan dalam Pencegahan HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS karena semuanya terlibat langsung di dalamnya. Dengan keenam informan ini, peneliti ingin menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan teori yang dibangun.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya (Basrowi & Suwandi, 2008:93). Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen:

3.7.1 Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan data tanpa pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2008:74). Peneliti menempatkan metode pengumpulan wawancara sebagai metode pengumpulan data utama di dalam penelitian ini.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, wawancara pendahuluan dan wawancara semistruktur. Pada

wawancara pendahuluan, tidak ada sistematika tertentu, tidak terkontrol, informal, terjadi begitu saja, tidak terarah, dan digunakan hanya untuk mengenalkan peneliti kepada orang yang akan diriset. Pada wawancara semistruktur, pewawancara pada umumnya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan (Kriyantono, 2006:101).

Peneliti pada awal penelitian menggunakan metode wawancara pendahuluan dengan maksud agar keberadaan peneliti dapat diterima di objek penelitian. Wawancara pendahuluan dimulai dari pengenalan diri peneliti, kemudian melakukan tanya jawab mengenai kasus AIDS yang sedang terjadi di Provinsi Banten secara *general* atau umum. Kemudian mengenalkan diri kepada orang-orang dalam struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.

Setelah wawancara pendahuluan dilakukan peneliti dengan mengunjungi langsung pada objek penelitian, maka peneliti akan masuk pada tahap wawancara semistruktur. Peneliti tidak menggunakan metode wawancara terstruktur dengan alasan karena dengan menggunakan metode tersebut, hasil jawaban yang didapat dikhawatirkan tidak terperinci. Karena permasalahan strategi komunikasi dianggap cukup luas dan tersusun. Oleh karena itu peneliti lebih leluasa untuk menggunakan metode wawancara semistruktur

dengan harapan hasil penelitian yang didapatkan lebih mendalam, jelas, dan terperinci.

3.7.2 Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Nasution dalam Sugiyono, 2009:64). Data yang merupakan fakta mengenai dunia kenyataan diperoleh dengan observasi. Melalui data yang diperoleh, maka peneliti dapat bekerja untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik.

Obvervasi yang dilakukan adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subyek yang diriset. Keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk, yaitu interaksi dan percakapan. Artinya selain perilaku nonverbal juga mencakup perilaku verbal dari orang-orang yang diamati (Kriyantono, 2006:110). Data yang diobservasi di dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal yang telah dituliskan di dalam tinjauan pustaka, diantaranya mengenai komunikasi, strategi komunikasi, pencegahan HIV/AIDS, dan perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada aktivitas keorganisasian yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.

Teknik observasi yang digunakan adalah teknik partisipasi pasif atau *passive participation*. Partisipasi pasif dimaksudkan bahwa

peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2009:66). Jadi pada teknik observasi ini, peneliti hanya bertindak mengobservasi tanpa tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diriset, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2006:112).

3.7.3 Studi Dokumen

Studi dokumen adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode wawancara pada umumnya dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2006:120). Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat. Dokumen publik dapat mencakup laporan polisi, berita-berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lainnya. Sedangkan dokumen privat dapat mencakup memo, faksimili, catatan telepon, surat perjanjian, dan lainnya.

Metode studi dokumen digunakan supaya peneliti dapat memperoleh data, informasi, dan beberapa keterangan mengenai pengertian, teori, konsep, dan pendapat yang terdapat di dalam dokumen-dokumen atau segala sesuatu yang berisi informasi terkait kegiatan organisasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2009:83). Proses dokumentasi juga akan peneliti lakukan pada berjalannya proses wawancara dan observasi. Setiap wawancara yang dilakukan, peneliti juga melakukan observasi dan juga dokumentasi. Proses dokumentasi yang dilakukan peneliti tentu dengan izin Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.

3.8 Teknik Analisis Data

Moleong (2001:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sehingga interpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset. Artinya, kemampuan periset memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya memenuhi unsur reliabilitas dan validitas atau tidak.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu yaitu terhitung dari Desember 2017. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik data model Miles dan Huberman. Dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2012:219). Dengan beberapa proses yang peneliti lakukan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang diperlukan peneliti mengenai aliran informasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dan focus pada hal-hal yang penting untuk dikategorisasikan sehingga mempermudah peneliti dalam menyimpulkan data secara jelas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah diperoleh ke dalam pola hubungan, sehingga data yang peneliti dapatkan akan semakin mudah dimengerti. Dalam penelitian ini penyajian data berupa uraian dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan peneliti.

3. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah terakhir dalam proses analisa data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, mengenai strategi komunikasi penyuluhan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat dan tepat.

3.9 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah pengujian yang ditekankan pada uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji *transferability*, uji *depenability*, dan uji *confirmability*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas antara lain dilakukan dengan; perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi (Sugiyono, 2012: 270-275).

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun belum. Pengujian ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang sudah diperoleh benar atau tidak.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

- b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya tidak hanya mengandalkan dari teknik wawancara, tetapi juga dengan teknik observasi dan studi dokumen.

- c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara perlu didukung oleh adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu tersebut dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti.

3.10 Jadwal Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Agenda	Bulan							
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Pra-Riset: Observasi								
Penyusunan Bab I, II, III								
Sidang <i>Outline</i>								
Pengumpulan Data								
Pengelolaan dan Analisis Data								
Penyusunan Bab IV								
Penyusunan Bab V								
Sidang Skripsi								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengususung permasalahan mengenai konsep strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dalam pencegahan AIDS yang ada di Provinsi Banten. Permasalahan AIDS terutama dengan semakin bertambahnya penderita HIV atau disebut sebagai ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) telah membuat aparat pemerintahan yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut perlu diteliti terutama dalam penyusunan strategi komunikasinya. Sesuatu yang menjadi tujuan atau *goals* dari suatu kegiatan di dalam organisasi tentu berangkat dari strategi komunikasi yang dibuat di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPA Provinsi Banten dalam pencegahan penyakit HIV AIDS di Provinsi Banten dengan menggunakan analisis model perencanaan komunikasi Philip Kotler.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dimana peneliti langsung datang ke lapangan dan menemui informan secara langsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup komponen organisasi dari model perencanaan komunikasi Philip Lesly yang diantaranya adalah analisis dan riset, perumusan kebijakan, perencanaan program pelaksanaan, kegiatan komunikasi. Keempat tahapan komponen

organisasi tersebut akan peneliti analisis berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan.

4.2 Deskripsi Subjek Penelitian

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2007 pasal 2 yang menjelaskan bahwa untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten/Kota perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sampai ke level Distrik/Kota. Pembentukan KPA, mempunyai enam tugas pokok dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Kemudian dalam peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 mengamanatkan pembentukan KPA Nasional, Provinsi, dan Kabupaten beserta Sekretariatnya dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan bertanggung jawab kepada kepala wilayah. Pemerintah telah menugaskan kepada Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat administrasi untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan AIDS di tanah air dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang melandasi kerja Komisi.

Struktur organisasi KPA Provinsi Banten dipimpin ketua KPA yaitu Gubernur Provinsi Banten, Ketua Pelaksana diduduki oleh Wakil Gubernur Banten, Wakil Ketua I diduduki oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan Wakil Ketua II diduduki oleh Kepala Biro Kesra Provinsi

Banten. Terdapat bagian yang menjadi bawahan dari Wakil Ketua II, yaitu Tim Asistensi yang diketuai oleh Dr. H. Santoso Edi Budiono, Sp.KK, diwakili oleh Kabag Sosmas BAPPEDA Provinsi Banten, dan dianggotai oleh Kabag Kesehatan dan Keluarga Berencana Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Kabid P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan H. R. Wahyu Santoso, SKM. Jajaran ketua dan wakil ketua merupakan jajaran tertinggi di dalam struktur organisasi KPA dan dapat dikatakan sebagai jajaran eksternal KPA Provinsi Banten.

Kesekretariatan yang terdapat di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten sendiri memiliki tiga bidang yang dikoordinir oleh Sekertaris KPA yaitu dr. H. Encep Mukardi. M.A.R.S beserta Asisten Sekretarisnya yaitu Bidang Program, Bidang Keuangan, Bidang Administrasi Umum. Bidang Program dikoordinatori oleh Jordan Jempormase dan dianggotai oleh Nor Berta Larasaty, S.IP, Lena Rahayu, Muhamad Yanto, ST, dan Rinelda Dwi Jayanti, SKM. Lalu Bidang Keuangan dikoordinatori oleh Imas Chumaeroh, SE dan dianggotai oleh Iip Nuropiah, Mutira Firda, Beni Surahman, SKM, dan Aat Sofyan. Dan yang terakhir Bidang Administrasi Umum yang dikoordinatori oleh Khaerunissa, S.Ikom dan dianggotai oleh Tri Agustinah, Kusnadi, Fuad, dan Lutpi. Bagian sekretariatan merupakan bagian dari struktur organisasi yang merupakan organ vital dari KPA, dimana segala aktivitas dalam penanggulangan HIV AIDS bermula dari kegiatan komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi ini.

Anggota dari KPA terdiri dari berbagai kepala aparatur Negara seperti Kepolisian, dinas-dinas terkait dan juga komunitas-komunitas yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS. Anggota yang terdaftar di dalam struktural organisasi KPA diantaranya yaitu (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten, 2017):

- | | |
|---|---|
| 1. Kepala Kepolisian Daerah Banten | 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten |
| 2. Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf | |
| 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten | 17. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten |
| 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Banten | 18. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten |
| 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten | 19. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Banten |
| 6. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten | 20. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Banten |
| 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten | 21. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten |
| 8. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten | 22. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten |
| 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten | 23. Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Banten |
| 10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten | 24. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Banten |
| 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten | 25. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten |
| 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Banten | 26. Ketua Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Banten |
| 13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten | 27. Ketua Ikatan Perempuan Positiv Indonesia Provinsi Banten |
| 14. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Banten | 28. Ketua Organisasi Pembaharuan Sosial Indonesia Provinsi Banten |
| 15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten | 29. Ketua Komunitas Sahabat |
| | 30. Ketua Komunitas Waria Banten |
| | 31. Ketua Ikatan Korban Napza Banten |

Data penelitian diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu melalui wawancara peneliti terhadap perwakilan dari tiap divisi yang terdapat di

dalam Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Jumlah informan yang peneliti gunakan sebagai sumber data yaitu sebanyak 6 orang. Informan sebanyak orang terdiri dari Sekretaris, Koordinator Bidang Administrasi Umum, Koordinator Bidang Program, Koordinator Bidang Keuangan, perwakilan anggota formal atau OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dan perwakilan anggota non-formal yaitu Ketua Komunitas IPPI (Ikatan Perempuan Positif Indonesia) Provinsi Banten.

Peneliti memilih Sekretaris KPA sebagai *key informan* karena Sekretaris lah yang merangkap sebagai ketua harian di KPA Provinsi Banten. Pimpinan diatas sekretaris seperti Gubernur sebagai Ketua dan Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua tidak memenuhi kriteria untuk diwawancarai karena tidak sering untuk terjun langsung ke dalam penanggulangan HIV AIDS atau hanya sebagai *stake holder* saja. Kemudian peneliti memilih koordinator dari tiap bagian karena merekalah yang mengepalari dan yang mengerti akan segala bentuk kegiatan yang ada di bagiannya.

Selanjutnya, peneliti memilih Kepala Dinas Sosial sebagai salah satu anggota OPD yang diwawancarai karena setelah peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris dan Koordinator Bagian, menurut mereka Dinas Sosial merupakan OPD yang sering terlibat dalam dalam penanggulangan HIV AIDS. Kemudian untuk anggota non-formal KPA Provinsi Banten, peneliti memilih Komunitas IPPI karena sesuai dengan

yang direkomendasikan oleh Koordinator Bagian Administrasi Umum, Komunitas IPPI termasuk ke dalam kategori komunitas yang aktif dan sering melakukan kegiatan bersama KPA Provinsi Banten.

Melihat kembali tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan ini difokuskan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi komunikasi yang berjalan dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh seluruh pelaku komunikator maupun komunikan di Komisi Penanggulangan AIDS. Data yang diperoleh peneliti nantinya akan dianalisis berdasarkan model perencanaan komunikasi Philip Lesly. Alasan peneliti memilih Komisi Penanggulangan AIDS sebagai subjek penelitian adalah karena melihat dari fakta yang peneliti amati langsung di masyarakat bahwa permasalahan HIV/AIDS merupakan permasalahan yang sensitif dan kompleks atau dapat menyangkut berbagai permasalahan sosial. Setelah menemukan permasalahan tersebut, sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan analisis sederhana mengenai siapa sebenarnya yang harus dilibatkan ke dalam permasalahan sosial tersebut.

Kesimpulan yang diambil dari analisis sederhana tersebut adalah pihak pemerintah dapat bergerak untuk menanggulangi permasalahan HIV/AIDS dengan adanya sebuah organisasi pemerintahan yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat yaitu Komisi Penanggulangan AIDS. Peneliti memilih Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten karena jangkauan KPA Provinsi Banten lebih luas dan mempunyai peranan penting dalam setiap pelaksanaan dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV

AIDS khususnya di wilayah-wilayah Provinsi Banten. Meninjau bagaimana komunikasi dan strateginya dalam mengkomunikasikan segala bentuk informasi mengenai pencegahan HIV AIDS merupakan titik penting dari adanya sebuah pelaksanaan pencegahan, oleh karena itu peneliti akan memfokuskan pada bagaimana strategi komunikasi yang terjadi di dalam organisasi pemerintahan KPA ini.

4.2.1 Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten

Tugas Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana yang telah tercantum pada Keputusan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten tentang Pembentukan Sekretariat Pengurus Harian dan Pembentukan Tim Asistensi Komisi Penanggulangan HIV AIDS (KPA) Provinsi Banten Periode 2016-2018, tugas sekretariat KPA adalah sebagai berikut:

- a. Mambantu Ketua KPA Provinsi dalam menyiapkan rencana strategis dan program aksi untuk penanggulangan AIDS di Provinsi Banten;
- b. Menyiapkan kebutuhan kesekretariatan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua KPA Provinsi Banten;
- d. Melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di tingkat daerah, wilayah maupun nasional;

- e. Menyebarluaskan informasi mengenai AIDS secara benar kepada masyarakat;
- f. Memobilisasi sumber daya;
- g. Memfasilitasi KPA Kabupaten/Kota, perangkat KPA Provinsi Banten dan Masyarakat sipil peduli AIDS;
- h. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan AIDS di Provinsi Banten;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Banten;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS di Provinsi Banten;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan j kepada Gubernur Banten selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.

4.2.2 Susunan Sekretariat Pengurus Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten Periode 2016-2018

Sekretaris : Dr. Encep Mukardi, MARS

Pengelola Program

Koordinator : Jordan Jempormase

Staff :

1. Nor Berta Larasaty, S.IP
2. M. Yanto, S.T
3. Rinelda Dwi Jayanti, SKM
4. Lena Rahayu

Pengelola Administrasi Umum

Koordinator : Khaerunnisa, S.I.kom

Staff :

1. Fuad, A.Md
2. Tri Agustinah M, A.Md
3. Kusnadi
4. Lutfi

Pengelola Keuangan

Koorinator : Imas Chumaeroh, SE

Staff :

1. Iip Nurrofiah, S.KM
2. Beni Surahman, SKM
3. Mutiara Firda
4. Aat Sofyan

4.3 Kegiatan Pencegahan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten

Kegiatan penanggulangan penyakit HIV dan AIDS menjadi salah satu fokus utama dari program kerja Komisi Penanggulangan AIDS. Beberapa program yang telah dijalankan KPA Provinsi Banten dalam aspek pencegahan yang termasuk ke dalam kegiatan preventif diantaranya yaitu Program Warga Peduli AIDS dan Program *Harm Reduction*. Kedua program tersebut merupakan beberapa program yang termasuk ke dalam kegiatan pencegahan terhadap penyakit HIV/AIDS.

Terlepas dari dibuatnya program dalam pencegahan HIV/AIDS, komunikasi yang dilakukan oleh pengurus KPA kepada instansi yang terdaftar di dalam keanggotaan KPA Provinsi Banten juga termasuk ke dalam salah satu kegiatan pencegahan. Melihat kembali dari tugas KPA yaitu diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga daerah, kegiatan pencegahan juga didasarkan kepada komunikasi yang terjalin antara KPA dan Instansi sebagai aktifitas pencegahan yang tersusun dan terstruktur.

4.3.1 Kegiatan Pencegahan dengan Program Warga Peduli AIDS

Komisi penanggulangan HIV AIDS menempatkan masyarakat sebagai target sasaran dari segala program penanggulangan HIV AIDS yang dilakukan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dari KPA Provinsi Banten, yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai HIV dan AIDS. Suatu tujuan utama atau *goals* yang menjadi fokus utama KPA dalam menanggulangi ketidaktahuan tersebut adalah

dengan melihat kembali mengenai 3 visi misi KPA, yaitu kegiatan pencegahan, berkurangnya angka kematian HIV AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah dengan mengkomunikasikan mengenai pencegahan HIV AIDS dengan “ABCD”; *Abstinence*, *Befaithfull*, *Condom*, *Drug*, dan *Educate*. *Abstinence* yaitu jangan melakukan hubungan seks kalau belum menikah, *Befaithfull* yaitu setia sama pasangannya, *Condom* yaitu penggunaan *condom* yang benar, *Drug* artinya tidak menggunakan narkoba yang penggunaan jarumnya berganti-ganti, dan *Educate* yaitu edukasi pendidikan secara terus menerus agar kita mengetahui perkembangan terbaru mengenai HIV AIDS.

Pengkomunikasian mengenai “ABCDE” ini dilakukan oleh Tim Penjangkau yang merupakan salah satu anggota dari KPA Provinsi Banten. Tim penjangkau adalah orang yang dilatih untuk menjangkau sasaran-sasaran yang beresiko. Hal yang dilakukan oleh tim penjangkau untuk mendekati sasaran khalayak beresiko secara langsung, seperti LSL (Lelaki Seks Lelaki), waria, penasun, ataupun pelanggannya untuk menyampaikan pencegahan HIV AIDS dengan “ABCDE” tersebut.

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten merancang suatu program untuk menumbuhkan rasa partisipatif masyarakat dalam penanggulangan HIV AIDS, yaitu Warga Peduli AIDS. Dalam

perencanaan program ini, banyak pihak-pihak yang ikut serta dalam pengusungannya.

Warga Peduli AIDS bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan HIV AIDS. Selain mengurus mengenai APBD yang digunakan dalam kegiatan tersebut, kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh KPA sendiri yaitu dengan komunikasi langsung dengan OPD-OPD terkait untuk mendorong dan merealisasikan program tersebut.

4.3.2 Kegiatan Pencegahan melalui Program *Harm Reduction*

Suatu rancangan mengenai perencanaan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan AIDS juga dirancang oleh KPA Nasional. Kegiatan yang dirancang oleh KPA Nasional tersebut yaitu *Harm Reduction*. *Harm Reduction* atau HR adalah program pengurangan dampak buruk terhadap penggunaan narkoba suntik. Dalam perencanaannya, target jumlah jarum suntik yang harus diproduksi dan disebar adalah sejumlah 1.000 pcs.

Program *Harm Reduction* dilakukan KPA bersama Dinas Kesehatan yang tidak lain merupakan Wakil Ketua I KPA Provinsi Banten dengan menyebarkan jarum suntik steril ke puskesmas yang ada di Provinsi Banten dalam upaya untuk memutus penularan HIV AIDS. Walaupun pengguna jarum suntik sudah banyak beralih ke narkoba jenis lain, namun kegiatan ini tetap dilakukan dengan harapan

dapat memperkecil penularan HIV dengan menggunakan jarum suntik.

4.3.3 Koordinasi dengan Instansi

Melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi menjadi salah satu dari tugas KPA Provinsi Banten yang juga termasuk ke dalam tindakan preventif yang dilakukan dalam penanggulangan HIV AIDS. Mengkoordinir instansi-instansi terkait permasalahan HIV AIDS termasuk ke dalam kegiatan perencanaan yang bertujuan untuk penyusunan rencana kegiatan atau program yang akan dilakukan.

Salah satu media yang menjadi media utama dalam pelaksanaan strategi komunikasi KPA Provinsi Banten kepada anggota eksternalnya adalah rapat koordinasi yang dilakukan setahun sekali. Di dalam rapat koordinasi tersebut, OPD-OPD yang tergabung dalam keanggotaan eksternal KPA Provinsi Banten dapat mengusulkan program-program penanggulangan HIV AIDS. Pembahasan yang dibahas dalam rapat koordinasi diantaranya adalah menyangkut rencana penanggulangan HIV AIDS, pembahasan mengenai gaya-gaya terbaru penularan HIV, dan program-program yang akan diusung untuk ke depannya.

4.4 Hasil Penelitian

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai informan sebanyak 6 orang, yang merupakan perwakilan dari tiap divisi dan

anggota. Poses wawancara pada informan pertama yang adalah *key informan* di dalam penelitian ini yaitu kepada Dr. H. Encep Mukardi, M.A.R.S (*informan 1*) selaku sekretaris KPA Provinsi Banten. Peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian yaitu kantor KPA Provinsi Banten yang berada di kawasan Brimob Kota Serang pada tanggal 9 Mei 2018. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2018, peneliti kembali mengunjungi kantor KPA untuk mewawancarai *informan 2* yaitu Khaerunissa, S.Ikom selaku Koordinator Bidang Administrasi Umum dan *informan 3* yaitu Jordan Jempormase selaku Koordinator Program. Lalu pada tanggal 15 Mei 2018 peneliti kembali lagi ke kantor KPA untuk mewawancarai *informan 4* yaitu Imas Chumaeroh, SE selaku Koordinator Bidang Keuangan.

Peneliti juga mengunjungi kantor Dinas Sosial Provinsi Banten yang terletak di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) untuk mewawancarai *informan 5* yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu perwakilan anggota formal atau OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dari KPA Provinsi Banten pada tanggal 15 Mei 2018. Peneliti di disposisikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten untuk mewawancarai seksi yang menangani permasalahan HIV AIDS yaitu kepada Drs. Asep Saepudin, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdaagangan Orang pada Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai anggota KPA Provinsi Banten. Setelah itu, pada tanggal 27 Mei 2018, peneliti kembali melakukan wawancara dengan *informan 6* yaitu Ketua Komunitas IPPI (Ikatan

Perempuan Positif Indonesia) sebagai salah satu perwakilan anggota Komunitas dari KPA Provinsi Banten. Hasil penelitian yang didapatkan mengenai kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten yang diperoleh dari wawancara dan observasi oleh peneliti kemudian dianalisis berdasarkan model perencanaan komunikasi Phili Lesly.

4.4.1 Tahapan Analisis dan riset pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, *Harm Reduction*, dan Koordinasi dengan Instansi

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*management communication*) untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2008:29). Segala bentuk tindakan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan harus berdasarkan dengan taktik yang sudah direncanakan sebelumnya. Suatu taktik dapat disusun pada saat perencanaan. Oleh karena itu perencanaan komunikasi menjadi aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan komunikasi yang akan dilakukan.

Suatu langkah sebelum melakukan sebuah strategi komunikasi adalah membuat suatu perencanaan komunikasi. Pada dasarnya, perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dan pencapaian tujuan, dengan cara apa yang

dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut (Mehall dalam Cangara, 2014:48).

Berdasarkan model perencanaan komunikasi Philip Lesly, suatu perencanaan komunikasi memiliki dua komponen utama, yaitu organisasi dan publik. Komponen organisasi memiliki empat tahapan, yaitu Analisis dan Riset, Perumusan Kebijakan, Perencanaan program pelaksanaan, dan Kegiatan Komunikasi. Keempat tahapan ini merupakan tahap yang dilakukan oleh perumus strategi yang dilakukan sebelum adanya pelaksanaan.

Kegiatan penanggulangan HIV AIDS yang terfokus kepada pencegahannya adalah Program Warga Peduli AIDS. Program Warga Peduli AIDS adalah suatu program yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa partisipatif masyarakat dalam penanggulangan HIV AIDS. Dalam perencanaan program ini, banyak pihak-pihak yang ikut serta dalam pengusungannya. Penjelasan mengenai perencanaan program Warga Peduli AIDS dijabarkan secara rinci oleh *informan 2*, dalam uraian di bawah ini:

“Kita punya Warga Peduli AIDS. Dulu itu memang diinisiatifkan sama anggarannya “Donor”. Terus akhirnya kita ngedorong nih OPD terkait, misalnya BPPMD (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat). “Ayo dong BPPMD bikin kegiatan yang intinya sih bisa ngumpulin

warga, bisa ngebentuk warga peduli AIDS!”. Jadi dulu memang diinisiatifkan dari Donor, nah akhirnya kan dana APBD bisa mem-backup itu, terus Kota maupu Kabupaten Kota “ayo dorong!”. Nah kalau misalkan nggak ada, kita dorong OPD terkait, misalnya BPPMD, kalau sekarang kan pecah, ada BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana) sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Khaerinnisa, 2018).

Komisi Penanggulangan AIDS sebagai penggerak dari program ini bertanggung jawab atas perencanaan mengenai program pencegahan ini. Dalam analisis model perencanaan komunikasi Philip Lesly, tahapan pertama yang dilakukan dalam perencanaan strategi komunikasi adalah analisis dan riset. Analisis dan riset dilakukan sebagai langkah awal untuk mendiagnosis atau mengetahui permasalahan yang dihadapi (Cangara, 2014:75).

Melihat kembali bahwa permasalahan yang menjadi fokus utama dalam pencegahan HIV AIDS adalah ketidaktahuan masyarakat akan penyakit HIV dan AIDS. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh *key informan* mengenai fenomena ‘ketidaktahuan’ masyarakat:

“Jadi tujuan KPA itu adalah agar 3 visi misi KPA dapat tercapai, yaitu pencegahannya berjalan, orang meninggal karena HIV juga berkurang atau bahkan tidak ada, dan yang terpenting untuk stigma dan diskriminasi tidak hanya difokuskan kepada penderitanya saja tetapi juga kepada masyarakat yang menstigma dan mendiskriminasi. Kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa penularan HIV itu tidak mudah seperti kegiatan dalam berhubungan sosial, HIV ditularkan melalui 4 cara yaitu melalui cairan mani, cairan vagina, darah, dan air susu ibu. Jadi kalau tidak kontak dengan ke empat tersebut, maka tidak akan tertularkan” (Mukardi, 2018).

Ketidaktahuan masyarakat mengenai penyakit HIV AIDS dan cara penularannya menjadi suatu permasalahan yang harus diperhatikan. Jika ditelaah mengenai ‘ketidaktahuan’ akan penyakit HIV AIDS, kembali lagi kepada pola *mindset* masyarakat di Indonesia khususnya Provinsi Banten yang menganggap HIV adalah penyakit yang mematikan. Adanya permasalahan mengenai ketidaktahuan masyarakat dan dipadukan lagi pada pencapaian atau *goals* dari KPA sendiri untuk menekan angka kasus HIV supaya tidak ada ODHA baru menjadi suatu tahapan analisis dan riset dari perencanaan program Warga Peduli AIDS ini.

Program kedua yang sama-sama terfokus pada kegiatan preventif yaitu pencegahan terhadap penyakit HIV AIDS yaitu Program *Harm Reduction*. *Harm Reduction* atau HR adalah suatu program yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk terhadap penggunaan narkotika suntik. Hal yang menjadi permasalahan dan perlu didiagnosa dari program ini adalah kembali lagi pada permasalahan bertambahnya kasus HIV.

Permasalahan yang menjadi bahan analisis dari perencanaan program ini adalah penekanan jumlah kasus HIV. Salah satu penyumbang yang ikut andil dalam penambahan kasus HIV di provinsi Banten adalah penasun atau pengguna jarum suntik. Pada dasarnya penasun atau pengguna jarum suntik termasuk ke dalam populasi kunci. Populasi kunci merupakan orang-orang yang biasa

melakukan kegiatan beresiko di kehidupannya. Salah satu dari populasi kunci ini perlu disasar agar populasi kunci tidak berubah menjadi ODHA. Penyediaan jarum suntik oleh pemerintah di harapkan dapat digunakan oleh penasun untuk menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian karena hal tersebut merupakan salah satu media yang baik dalam penularan HIV. Fenomena tersebut menjadi salah satu dasar dari pembuatan program ini.

Pada dasarnya kegiatan yang berperan besar dalam pencegahan HIV AIDS adalah terdapat pada komunikasi yang terjadi di dalam Komisi Penanggulangan AIDS itu sendiri. Jika melihat kembali tugas dari KPA, tercantum bahwa KPA bertugas untuk melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di tingkat daerah, wilayah maupun nasional. Hal tersebut menjadi poin penting di dalam segala kegiatan yang menyangkut pencegahan HIV AIDS.

Suatu permasalahan yang menjadi bahan analisis dari kegiatan koordinasi ini tidak lain adalah merujuk pada tugas dari Komisi Penanggulangan AIDS sendiri. Suatu kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan dengan baik melalui kerjasama yang dijalin dengan lembaga dan instansi yang secara langsung telah terdaftar di dalam keanggotaan KPA untuk bersama-sama melakukan pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten. Komunikasi yang dibangun antara

KPA Provinsi Banten dengan instansi menjadi kunci utama dalam perencanaan suatu kegiatan program pencegahan HIV AIDS.

4.4.2 Tahapan perumusan kebijakan pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, *Harm Reduction*, dan Koordinasi dengan Instansi

Tahapan selanjutnya yang menjadi salah satu tahapan dari model perencanaan komunikasi Philip Lesly adalah perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan tahapan yang mencakup strategi yang akan digunakan (Cangara, 2014:75). Di dalam tahapan ini, perencanaan mengenai tak-tik yang akan digunakan dalam kegiatan sudah dirancang dan disusun.

Pengimplementasian tahapan perumusan kebijakan dalam program Warga Peduli AIDS terdapat pada kegiatan koordinasi yang dilakukan KPA yang diawali dengan pemilihan OPD yang sejalan dengan program WPA yang akan diusung KPA Provinsi Banten. Koordinasi dengan instansi mempunyai peranan besar di dalam perencanaan kegiatan Warga Peduli AIDS.

Selain melakukan koordinasi dengan instansi, di dalam tahapan perumusan kebijakan terdapat perencanaan mengenai kegiatan pelatihan yang menjadi kegiatan penting di dalam program Warga Peduli AIDS. Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada warga mengenai penyakit AIDS dan melatih warga dengan cara ToT (*Training of Trainer*) untuk bisa mentransferkan

ilmunya kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan *informan 2* mengenai perencanaan program Warga Peduli AIDS:

“Nah untuk memberitahu itu, jadi, misalnya kita melatih nih, melatih misalnya ada 100 warga yang tersebar di Banten ada 8 Kabupaten Kota. Nah orang-orang yang dilatih ini diharakan kayak TOT, mereka bisa mentransfer ilmunya ke warga setempat” (Khaerunnisa, 2018).

Pada dasarnya untuk melakukan pelatihan tersebut, terdapat strategi komunikasi yang dipakai oleh pembicara sebagai komunikator yang menjadi salah satu pembahasan penting dalam tahapan perumusan kebijakan. Pembicara atau komunikator dituntut untuk mempunyai *skill* atau kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dan dapat mempersuasif orang lain. Selain mempunyai *skill* yang baik, seorang komunikator juga harus bisa menganalisis khalayak. Strategi mengemas pesan juga perlu dipahami oleh seorang komunikator sesuai dengan sasaran khalayak yang dituju. Hal ini sesuai dengan pernyataan *informan 2* mengenai perencanaan program Warga Peduli AIDS:

“Kalau kita ngasih tahu “HIV AIDS adalah Human Immunodeficiency.....” aduh itu nggak bakal sampai pesannya. Tapi kita gunain bahasa yang sipel, “pokoknya ini adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh”. Nah dalam hal tersebut juga kan perlu skill. Kalau misalkan kita maksain untuk berbicara yg susah biar sesuai dengan yang di teks, tapi lihat audiens-nya. Balik lagi kalau audiensnya mahasiswa mungkin mengerti, tapi kalau masyarakat yang tingkat pendidikannya kita nggak tahu mungkin mereka juga nggak sekolah. Nanti pada akhirnya informasinya cuman mentok di dia doang, tidak menyebar ke yang lain. Nah itu, jadi kalau seseorang mempunyai kemampuan buat mengolah informasi yang didapatnya dan mempunyai skill

komunikasi yang bagus pasti kan bisa menyampaikan dengan baik” (Khaerunnisa, 2018).

Selain mampu menganalisis khalayak dengan baik, seorang komunikator dalam kegiatan pelatihan Program Warga Peduli AIDS juga harus memperhatikan jenis pelatihan yang akan dipilih. Pelatihan sebaiknya dilakukan dengan model melingkar agar seluruh *audiens* atau komunikan dapat menerima informasi dengan baik. Strategi penyusunan tempat pelatihan dijelaskan secara rinci oleh *informan 2*, bahwa:

“Kalau bikin pelatihan yang audiens-nya banyak, narasumbernya kan pasti satu, itu berpengaruh banget. Orang yang di belakang nggak akan denger kita. Jadi konsepnya kalau kayak classmeeting gitu, nggak akan nangkep yang dibelakang. Tapi kalau kita bikin kelas belajar, entah model U, entah mungkin melingkar, partisipan dari audiens-nya juga dipancing banget, dari misalnya 100 saya yakin 45% nya bisa nangkep, 55% nggak usah diharep. Tapi kalau misalnya classmeeting yang dibelakang sibuk sendiri, ada yang ijin keluar. Jadi kalau misalkan cuman seremoni pertemuan pasti akan begitu, tapi kalau kita ngadain pelatihan, ya namanya kan ikut pelatihan, orang yang ngikut pelatihan ini minimal dia harus bisa ngasih informasi ke orang lain” (Khaerunnisa, 2018).

Tahapan perumusan kebijakan pada model perencanaan komunikasi menurut Philip Lesly dalam program Warga Peduli AIDS yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten dapat dijabarkan oleh beberapa poin. Poin pertama, KPA Provinsi Banten melakukan koordinasi dengan instansi yang dapat membantu dalam pelaksanaan program ini untuk mencari warga-warga yang dapat mentransfer informasi dari Komisi Penanggulangan AIDS mengenai pencegahan HIV dengan baik. Poin kedua, kegiatan utama

dalam program Warga Peduli AIDS ini adalah pelatihan kepada warga yang bisa mentransferkan ilmu yang didapat dari KPA ke orang lain di sekitarnya. Poin ketiga, KPA Provinsi Banten mempersiapkan SDM dengan kualifikasi mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, dapat menganalisis khalayak, dan dapat mengemas pesan dengan baik.

Program lain yang termasuk ke dalam kegiatan pencegahan adalah Program *Harm Reduction*. Tahapan perumusan kebijakan di dalam perencanaan komunikasi yang dilakukan KPA Provinsi Banten pada program *Harm Reduction* adalah menargetkan jumlah produksi jarum suntik yaitu sejumlah 1.000 pcs. Program *Harm Reduction* merupakan program yang diusung oleh KPAN dan program ini merupakan program nasional yang juga di usung oleh KPA daerah lain di Indonesia. Pada dasarnya perencanaan mengenai program *Harm Reduction* bertujuan untuk memutus penularan HIV melalui jarum suntik. Perencanaan yang di susun untuk pelaksanaan program ini adalah menargetkan dan memilih tempat yang dapat digunakan sebagai penyalur dari pemerintah kepada penasun.

Kegiatan koordinasi dengan instansi menjadi salah satu dari kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh KPA. Pada perumusan kebijakan yang dimana di dalamnya terjadi penyusunan strategi, hal-hal yang menjadi fokus pembahasan agar terbentuknya suatu koordinasi yang baik antara KPA dan instansi adalah dengan membuat suatu kegiatan yang dapat menjadi tempat terjadinya interaksi

langsung antara pengurus KPA dengan anggota KPA yang diantaranya adalah instansi atau OPD yang ada di Provinsi Banten. Kegiatan untuk menampung aspirasi dan menjadi tempat berinteraksi antara KPA dan instansi tersebut adalah Rapat Koordinasi. Rapat ini menjadi salah satu kegiatan yang penting di dalam perencanaan mengenai kegiatan pencegahan di masa yang akan datang karena Rapat Koordinasi ini merupakan titik awal dari rancangan sebuah kegiatan program pencegahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh *informan 3* mengenai Rapat Koordinasi:

“Dalam Rapat Koordinasi, itu kan ada tenggat waktu yang diberikan oleh aturan bahwa di dalam perencanaan program untuk 1 tahun kedepan, nah di dalam tahun berjalan itu sudah harus dibuat rancangan program kerjanya. Nah di dalam rancangan program kerja itu dibuatlah sebuah pertemuan, di dalam pertemuan itu ada forum rembuk, ada usul dan saran, nah pertemuan itulah dinamakan Rapat Koordinasi” (Jempormase, 2018).

Koordinasi dengan instansi menjadi salah kegiatan yang termasuk ke dalam aktifitas pencegahan. Pada dasarnya semua yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS tidak terlepas dari tupoksi. Tupoksi dari KPA yang diantaranya adalah mengkoordinasi, mengadvokasi, memfasilitasi dan memberikan pembinaan. Fungsi-fungsi tersebut kemudian akan implementasikan ke dalam program kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.

4.4.3 Tahapan perencanaan program pelaksanaan pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, *Harm Reduction*, dan Koordinasi dengan Instansi

Setelah melakukan tahapan perumusan kebijakan, tahapan selanjutnya yang menjadi komponen organisasi di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly adalah tahapan perencanaan program pelaksanaan. Hal-hal yang menjadi perhatian di dalam tahapan ini adalah sudah ditetapkannya sumber daya yang akan digerakkan, antara lain tenaga, dana, dan fasilitas (Cangara, 2014:75). Tahapan perencanaan program pelaksanaan merupakan langkah selanjutnya dimana perencanaan dituntut untuk lebih jelas dan terperinci agar di dalam pengekseskusion kegiatan akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang tersusun.

Pada tahapan perencanaan program pelaksanaan, dalam program Warga Peduli AIDS, perencanaan mengenai instansi-instansi yang dapat membantu dalam kegiatan komunikasi telah ditetapkan. Instansi atau OPD yang dipilih KPA untuk membantu program Warga Peduli AIDS ini diantaranya adalah BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari *informan 2* mengenai pemilihan BPPMD sebagai instansi yang akan membantu program Warga Peduli AIDS:

“Kita mendorong OPD terkait, misalnya BPPMD, kalau sekarang kan pecah, ada BPMPKB (Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana) sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah yang berkaitan dan pokoknya bisa ngumpulin masyarakat itu dinas mana, ya kalo nggak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya BPMPKB, karena ibu-ibu KB, ibu-ibu Kader Posyandu. Jadi pada program WPA ini, kita ambil kader-kader posyandu dulu nih yang biasa bisa ngomong, bisa mempersuasif orang, nah dari situ mereka bisa mentransfer ilmu sehingga diharapkan masyarakat tuh nggak menstigma lagi bahan kalau misalnya memang ada kasus di daerahnya, ayo sama sama dibantu gitu loh. Kalau misalnya mereka orang miskin gimana? Ayo kita kan punya JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran), nah kader posyandu atau kader-kader kesehatanan tahu, “oh ini untuk mengakses JKN PBI itu bagaimana sih tahapannya?” (Khaerunnisa, 2018).

Pemilihan BPMPKB dan Dinas Pemberdayaan Desa sebagai instansi yang dapat membantu program WPA ini adalah didasarkan pada tupoksi dari instansi itu sendiri. BPMPKB pada hakikatnya mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana. Tupoksi ini sejalan dengan kegiatan WPA yang pada dasarnya membutuhkan tenaga yang berhubungan dengan pelayanan pemberdayaan masyarakat. Tenaga yang telah dipilih untuk membantu program ini adalah kader-kader posyandu. Kader posyandu merupakan tenaga sukarela yang dipilih untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat. Pemilihan kader posyandu pada program Warga Peduli AIDS diposisikan sebagai komunikator di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada tahapan perencanaan program pelaksanaan pada program *Harm Reduction*, tempat yang berperan sebagai penyedia jarum suntik

adalah puskesmas sebagai pusat kesehatan yang digunakan oleh masyarakat. Target khalayak yang disasar pada program HR ini adalah pemakai narkoba yang menggunakan jarum suntik sebagai medianya. Untuk anggaran mengenai program ini telah diatur oleh KPAN yang langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Untuk berjalannya kegiatan koordinasi yang dilakukan KPA Provinsi Banten kepada instansi dalam perencanaan kegiatan pencegahan menjadi salah satu alasan diusungnya Rapat Koordinasi. Rapat Koordinasi menjadi tempat KPA menjalin komunikasi langsung kepada instansi yang terdaftar kedalam keanggotaan KPA Provinsi Banten. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan penting yang menjadi awal dari perencanaan kegiatan dalam pencegahan HIV AIDS, maka dari itu kegiatan ini mempunyai anggaran sendiri dan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali.

Penetapan jangka waktu per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali dilakukan dengan tujuan agar koordinasi dengan instansi atau OPD tetap terjalin dengan baik. Hal-hal yang menyangkut permasalahan HIV dan rencana kegiatan pencegahan yang akan dilakukan dapat dibahas pada kegiatan Rapat Koordinasi tersebut.

4.4.4 Tahapan kegiatan komunikasi pada perencanaan strategi komunikasi Kegiatan Warga Peduli AIDS, *Harm Reduction*, dan Koordinasi dengan Instansi

Tahapan selanjutnya di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly yang menjadi tahapan akhir dalam komponen organisasasi adalah kegiatan komunikasi. Tahapan kegiatan komunikasi adalah tindakan yang harus dilakukan, yakni membuat dan menyebarluaskan informasi baik melalui media massa maupun melalui saluran-saluran komunikasi lainnya (kelompok, tradisional, media baru, *focus group*, publik) (Cangara, 2014:75). Kegiatan komunikasi merupakan tahapan pelaksanaan dari perencanaan komunikasi yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya.

Pada program Warga Peduli AIDS pada dasarnya kegiatan komunikasi yang dilakukan yaitu dengan penerapan komunikasi menggunakan sistem ToT (*Training of Trainer*). Sesuai dengan perencanaan mengenai perumusan kebijakan yang telah dilakukan, ToT ini menjadi komunikasi yang efektif di dalam mentransfer sebuah informasi yang nantinya akan kembali disalurkan kepada orang lain.

Tenaga yang telah terpilih pada tahap koordinasi dengan BPMPKB kemudian dilatih melalui pelatihan yang dilangsungkan oleh KPA. Pelatihan pada program WPA tersebut menggunakan sistem ToT dengan tujuan informasi yang disampaikan oleh KPA dapat dikomunikasikan kembali kepada orang lain. Untuk jenis pelatihan dirancang dengan menggunakan model “U” supaya pembicara atau komunikator lebih dekat dengan *audience* atau komunikan sehingga komunikasi berjalan dengan efektif dan

menimbulkan komunikasi transaksional di dalamnya. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi ganda dari strategi komunikasi yaitu menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal (Effendy, 2008:28).

Pengaplikasian sistem ToT dilakukan dengan komunikasi transaksional dengan komunikasi. Pada pelaksanaan pelatihan, komunikator melakukan sesi tanya jawab kepada *audience*. Hal ini dibenarkan oleh *informan 2* mengenai pelaksanaan kegiatan komunikasi pada pelatihan Program Warga Peduli AIDS:

“Jadi misalkan ada slot materi komunikasi nih, seperti Public Speaking, nah nanti kan mereka punya kesempatan buat “ayo yang kemarin sudah dapat informasi apa saja, silahkan bicara di depan”, diberi kesempatan bagaimana caranya menyampaikan informasi” (Khaerunnisa, 2018).

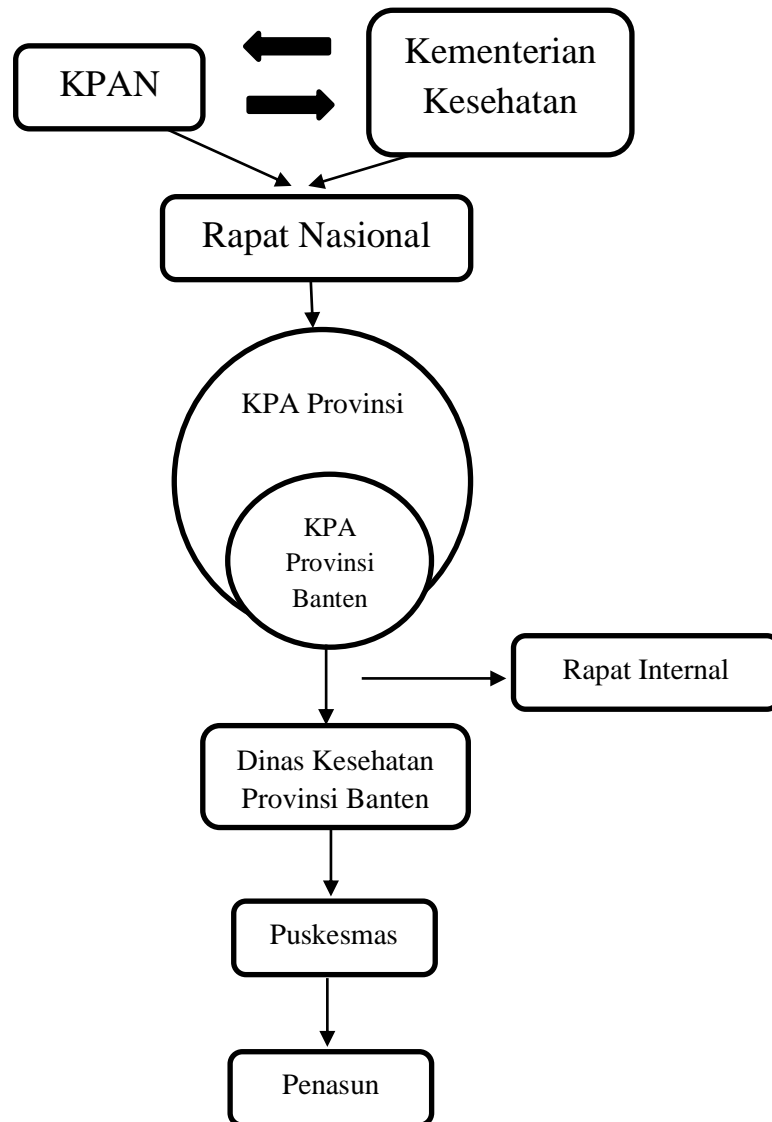
Pada dasarnya di dalam pelatihan untuk Program Warga Peduli AIDS memfokuskan kepada penyampaian materi tentang cara menyampaikan informasi kepada orang lain. Komunikator atau *audience* pada saat selesai mengikuti pelatihan ini dituntut untuk bisa menyampaikan informasi yang telah didapat kepada orang lain di sekitarnya. Hal tersebut merupakan dasar pokok dari sistem ToT yang digunakan dalam tahapan kegiatan komunikasi di dalam Program Warga Peduli AIDS.

Pada tahapan kegiatan komunikasi di dalam program *Harm Reduction* yang dimana program ini adalah program yang dibuat oleh

KPAN untuk memutus penularan HIV melalui media jarum suntik, sesuai dengan tahapan-tahapan sebelumnya, pada pelaksanaannya, jarum suntik telah disebar di berbagai daerah melalui koordinasi dengan KPA provinsi di seluruh Indonesia. Penyebaran informasi mengenai pelaksanaan program ini dari KPAN kepada KPA provinsi dilakukan melalui rapat nasional yang diadakan oleh KPAN bersama dengan Kementerian Kesehatan. Untuk Provinsi Banten sendiri, penyebaran jarum suntik mempunyai target sebanyak 1.000 pcs.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPA Provinsi Banten adalah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. KPA Provinsi Banten dengan bantuan Dinas Kesehatan menyebarkan 1.000 pcs jarum suntik tersebut ke puskesmas yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten. Untuk perencanaan mengenai penyebaran jarum suntik ini dirancang pada rapat internal KPA Provinsi Banten. Berikut merupakan gambaran sederhana mengenai aliran pendistribusian informasi pada Program *Harm Reduction*:

Gambar 4.1

Aliran pendistribusian informasi pada Program *Harm Reduction*

Sumber: Diolah oleh Peneliti. 2018.

Pada kegiatan koordinasi yang tertuang di dalam rapat koordinasi KPA Provinsi Banten kepada instansi atau OPD, tahapan kegiatan komunikasi atau pelaksanaannya dilakukan setahun sekali

dan per-6 bulan sekali. Hal ini sejalan dengan pernyataan *informan 4* mengenai kegiatan komunikasi pada Rapat Koordinasi dengan instansi:

“Untuk RAKOR atau Rapat Koordinasi biasanya ita mengadakannya setahun sekali. Paling setelah turun dana biasanya di pertengahan tahun. Jadi seluruh OPD yang asuk ke anggota KPA diundang sama kita. Terus kita juga menanyakan kepada anggota kita, apakah di OPD itu ada anggaran untuk penanggulangan HIV. Untuk Rapat Koordinasi diselenggarakan sendiri oleh KPA, biasanya undangan ditandatangani sama ketua, ketuanya itu kan Gubernur Provinsi Banten, jadi kalau memanggil anggota KPA melewati surat yang ditandatangani oleh ketua, soalnya kan yang dipanggil kepala-kepala dinas atau OPD” (Chumaeroh, 2018).

Selain membahas mengenai permasalahan HIV, hal-hal yang ikut dibahas di dalam Rapat Koordinasi adalah mengenai ada atau tidaknya anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS di masing-masing OPD. Pada dasarnya, hal-hal yang dibahas di dalam Rapat Koordinasi tidak hanya seputar perencanaan kegiatan HIV sebagai kegiatan preventif, namun program-program yang telah dilakukan akan dibahas sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang sudah berkoordinasi pada program tersebut. Berlangsungnya rapat koordinasi dibenarkan oleh *informan 5*, bahwa:

“KPA juga mengadakan rapat koordinasi tahunan yang dimana KPA nanti mengundang anggotanya yang ada dari DinKes, DinSos, DinDik, ormasnya juga ada IPPI, Sahabat, dan banyak lagi. Nanti ada evaluasi masing-masing anggota, pertama mengevaluasi sejauh mana pencegahannya, menurunkan angka kematian, atau pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Dan data-data kita biasanya dipadukan antara data KPA dan data DinKes, nanti KPA menyajikan data, DinKes juga

menyajikan data, terus membahas upaya penanggulangannya seperti apa. Disana juga dibahas mengenai strategi penanggulangannya misalkan dari DinKes apa saja strateginya, yang selama ini dilaksanakan oleh DinKes itu apa, melalui gerakan apa. Kemudian dibahas juga mengenai program yang berjalan misalkan selama ini yang aktif mana, misalkan DinKes membantu pengobatan bagi ODHA, DinSos mengenai acara bantuan nutrisi susu kemudian mengucapkan terima kasih, terus ditanyakan partisipasi anggota yang lainnya” (Saepudin, 2018).

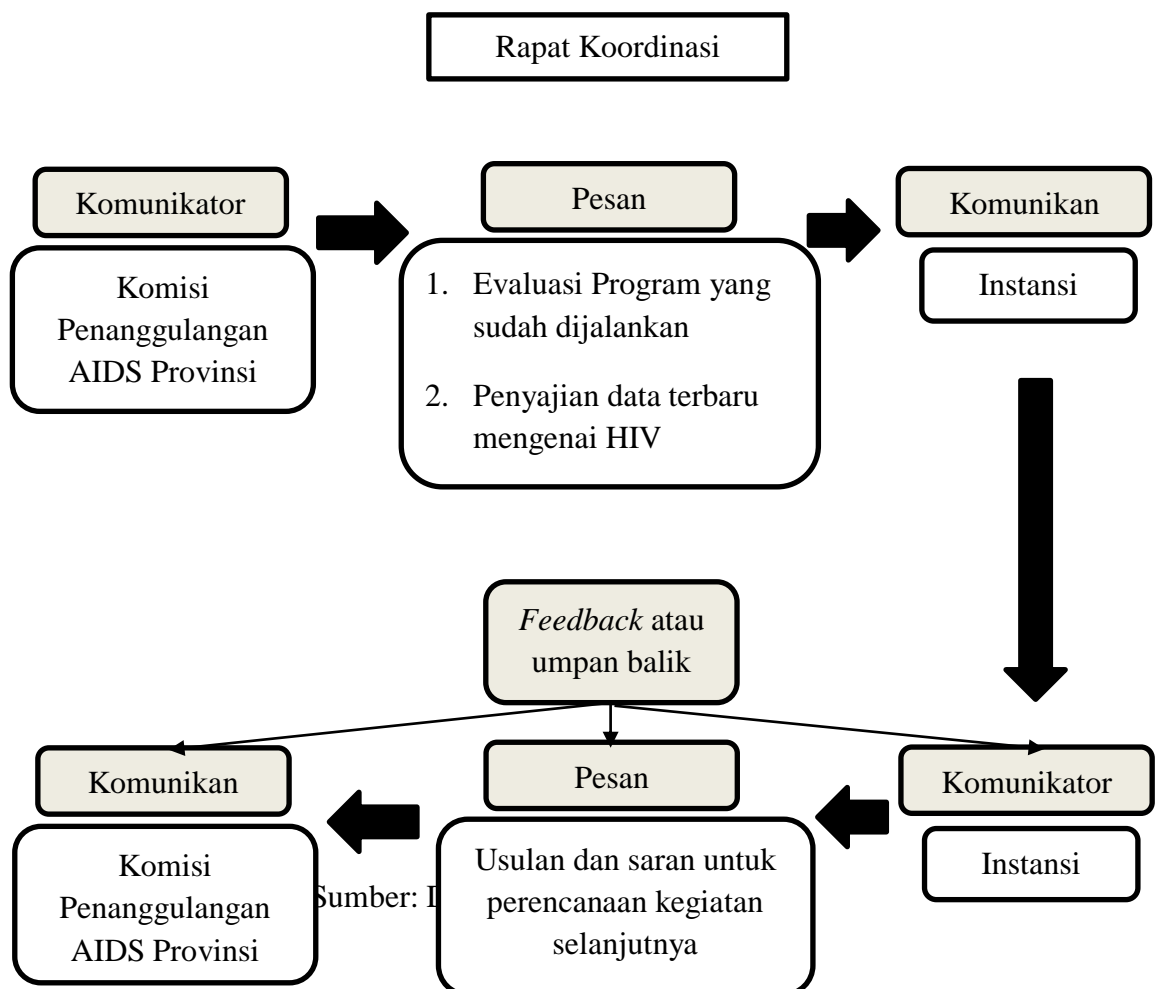
Dalam Rapat Koordinasi, proses komunikasi terjalin antara KPA Provinsi Banten sebagai komunikator, pengevaluasian sejauh mana pencegahan HIV menurunkan angka kematian dan strategi penanggulangan HIV AIDS sebagai pesan, dan instansi yang termasuk ke dalam keanggotaan KPA Provinsi Banten sebagai komunikan. Sementara untuk *feedback* atau umpan balik yang didapat adalah perencanaan rancangan program kerja yang berasal dari saran dan usul instansi atau OPD di dalam Rapat Koordinasi. Hal ini dibenarkan pula oleh *informan 6* mengenai pelaksanaan kegiatan komunikasi Rapat Koordinasi oleh KPA Provinsi Banten:

“Rapat Koordinasi itu bukan hanya dengan komunitas, tetapi juga dengan semuanya. Jadi kita duduk satu meja, dari semua stakeholder. Jadi kan ada KPA Kabupaten Kota, ada organisasi, ada dinas-dinas, sama biasanya sih diundang ketuanya yaitu Gubernur, cuman jarang datang. Palingan kayak sekda nya, tapi sekjanya pun jarang datang, palingan dari dinas kesehatan. Biasanya sih yang dibahas, KPA hanya menyampaikan mereka telah melakukan apa, terus kalau misalkan mereka akan melakukan apa mereka akan meminta masukkan. Kayak misalkan mau ada hari AIDS sedunia, mereka minta masukkan nih, kegiatan apa yang mereka harus lakuin, terus siapa aja yang mau terlibat sebagai panitia. Kayak gitu” (Annisa, 2018).

Secara sederhana, proses komunikasi yang terjadi di dalam pelaksanaan rapat koordinasi dapat dijelaskan melalui gambaran berikut:

Gambar 4.2

Proses komunikasi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi



Pada dasarnya analisis model perencanaan komunikasi yang dikemukakan oleh Philip Lesly menggambarkan bahwa perencanaan

terbagi menjadi dua komponen utama, yakni Organisasi yang menggerakkan kegiatan dan Publik yang menjadi sasaran kegiatan. Pada penelitian mengenai perencanaan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS ini, peneliti hanya meneliti sampai pada tahapan yang termasuk ke dalam komponen organisasi saja sebagai penggerak kegiatan pencegahan. Komponen publik yang terdapat di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly tidak dianalisis karena Komisi Penanggulangan AIDS tidak melakukan perencanaan komunikasi yang terstruktur mengenai umpan balik dan evaluasi.

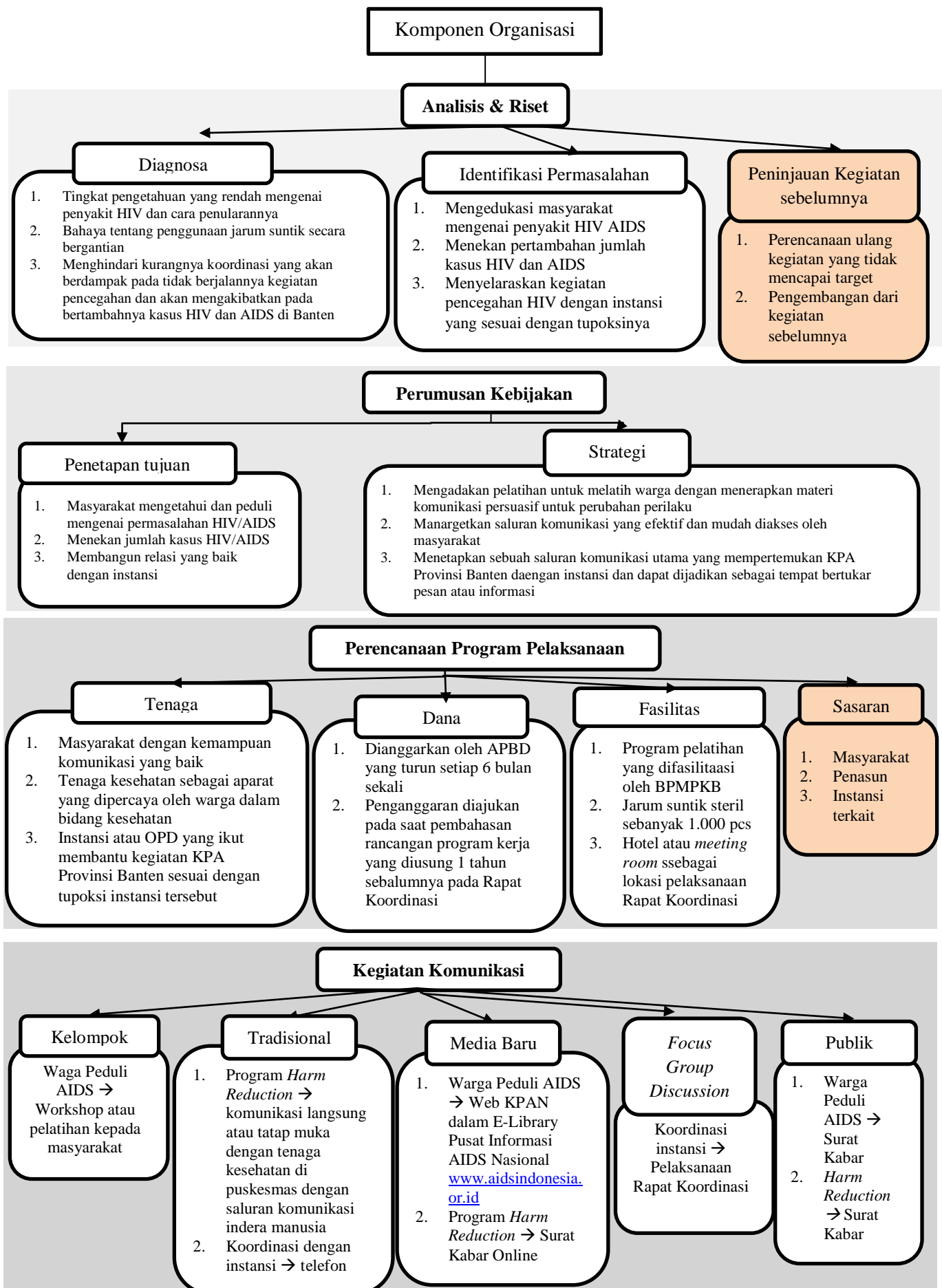
4.5 Pembahasan

Analisis data dilakukan peneliti setelah melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dengan teknik partisipasi pasif, dan studi dokumen yang kemudian dianalisis berdasarkan identifikasi masalah dan tinjauan pustaka. Kegiatan analisis data yang dilakukan oleh peneliti ditinjau berdasarkan hasil penelitian yang kemudian diinterpretasikan ke dalam analisis model perencanaan komunikasi Philip Lesly.

Berikut adalah gambaran yang berisi ringkasan dari perencanaan komunikasi dalam kegiatan pencegahan HIV AIDS dengan menggunakan analisis model perencanaan komunikasi Philip Lesly:

Gambar 4.3

**Proses Perencanaan Kegiatan Pencegahan HIV/AIDS Komisi
Penanggulangan AIDS dengan pengimplementasian analisis Model
Perencanaan Komunikasi Philip Lesly**



4.5.1 Tahapan Analisis dan riset dengan mendiagnosa, mengidentifikasi permasalahan, dan peninjauan kegiatan sebelumnya

Proses perencanaan komunikasi menurut model perencanaan Philip Lesly diawali oleh tahapan analisis dan riset. Di dalam tahapan ini, terdapat indikator yang bisa membantu dalam menelaah apa saja poin-poin yang dapat dilakukan di dalam kegiatan analisis dan riset. Indikator-indikator yang terdapat di dalam tahapan analisis dan riset diantara yaitu diagnosa dan identifikasi permasalahan.

Pada tahapan analisis dan riset, pendiagnosaan pada Program Warga Peduli AIDS adalah didasarkan pada tingkat pengetahuan yang rendah mengenai penyakit HIV dan cara penularannya. Hal ini menjadi titik awal dari dibuatnya sebuah program bernama Warga Peduli AIDS yang pada dasarnya di dalam program ini KPA Provinsi Banten berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV AIDS.

Diagnosa kedua yang masuk kedalam tahapan analisis dan riset pada program *Harm Reduction* adalah Bahaya tentang penggunaan jarum suntik secara bergantian. Pada dasarnya, menggunakan jarum suntik bergantian yang dilakukan oleh pemakai narkoba merupakan media yang baik dalam penularan HIV. Hal ini menjadi bahan analisis yang dilakukan oleh KPA di dalam proses perencanaan kegiatan *Harm Reduction* ini.

Diagnosa ketiga mengenai tahapan analisis data pada proses perencanaan komunikasi kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh KPA Provinsi Banten berkaitan dengan membangun relasi dengan instansi yang menjadi anggota dari KPA Provinsi Banten. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan Komisi Penanggulangan AIDS merupakan hasil dari koordinasi dengan Instansi-Instansi untuk membatu jalannya kegiatan KPA. Koordinasi tersebut termasuk ke dalam proses perencanaan kegiatan dengan diagnosa awal untuk membangun relasi yang baik dan akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu diagnosa ketiga dari tahapan analisis dan riset adalah menghindari kurangnya koordinasi yang akan berdampak pada tidak berjalannya kegiatan mengenai pencegahan dan akan mengakibatkan pada bertambahnya kasus HIV dan AIDS di Provinsi Banten. Untuk itu perlu adanya perencanaan untuk membangun komunikasi dan relasi yang baik antara KPA dan Instansi.

Adapun indikator kedua di dalam tahapan analisis dan riset adalah identifikasi permasalahan. Pada program Warga Peduli AIDS, identifikasi permasalahan yang ditemukan adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penyakit HIV AIDS. Dengan melihat pendiagnosaan sebelumnya yaitu mengenai faktor ketidaktahuan yang merupakan kunci permasalahan

HIV AIDS, menjadi dasar dari perlunya pengedukasian kepada warga mengenai penyakit mematikan ini.

Kemudian dalam pengidentifikasian pada penganalisaan perencanaan Progam *Harm Reduction*, permasalahan yang ditemukan dan menjadi bahan rujukan dari perencanaan yaitu menekan pertumbuhan jumlah kasus HIV dan AIDS. Fenomena mengenai tren penggunaan jarum suntik secara bergantian oleh pengguna narkoba membuat KPA sadar dan perlu untuk melakukan analisa. Pada dasarnya penasun merupakan penyumbang yang ikut berperan dalam bertambahnya kasus HIV di Provinsi Banten. Penggunaan jarum suntik secara bergantian merupakan tindakan beresiko yang menjadi awal dari penularan HIV AIDS dari pengguna narkoba berstatus positif dan dan pengguna narkoba berstatus negatif.

Pengidentifikasian permasalahan yang ketiga adalah lebih memfokuskan pada relasi internal dan eksternal KPA yang perlu dijaga untuk mendukung perencanaan kegiatan dalam pencegahan HIV/AIDS. Menyelaraskan kegiatan pencegahan HIV dengan instansi yang sesuai dengan tupoksinya merupakan permasalahan inti yang perlu diberikan perhatian khusus dalam pengusungan sebuah kegiatan perencanaan pencegahan HIV. KPA Provinsi Banten sendiri sadar bahwa keikutsertaan instansi dalam kegiatan pencegahan merupakan hal penting yang ikut mempengaruhi keberlangsungan sebuah

kegiatan. Untuk itu, hubungan komunikasi yang baik dan koordinasi yang terstruktur dan terus menerus harus selalu dilakukan.

Indikator-indikator dari tahapan analisis dan riset dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly menjelaskan mengenai pendiagnosaan dan pengidentifikasian permasalahan. Model analisis dan riset yang dibuat oleh Philip Lesly ini lebih menjelaskan mengenai tahapan analisis dan riset berdasarkan fenomena dan temuan permasalahan di masyarakat. Namun menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan, terdapat indikator lain yang ikut masuk ke dalam salah satu indikator analisis dan riset. Indikator tersebut adalah pengajuan kegiatan sebelumnya.

Kegiatan yang direncanakan oleh KPA Provinsi Banten tidak serta merta berdasarkan fenomena dan kondisi permasalahan mengenai HIV yang berkembang di masyarakat. KPA Provinsi sadar bahwa tugas dan tupoksi mereka adalah untuk membuat sebuah kegiatan yang harus mempunyai dampak besar di tengah-tengah masyarakat. Namun ada kalanya sebuah program yang telah dilaksanakan sebelumnya dan sudah melalui pengevaluasian tidak membuahkan hasil yang signifikan atau target dari program tersebut tidak dapat tercapai. Untuk itu di dalam perencanaan yang masuk ke dalam tahapan analisis dan riset di dalam KPA Provinsi Banten, terdapat bahasan mengenai perencanaan kembali program yang sudah

dilaksanakan, dimana hasil dari pelaksanaan program tersebut menjadi bahan pembahasan di dalam tahapan analisis dan riset.

Dengan adanya pengindikatoran diagnosa, identifikasi permasalahan, dan peninjauan kegiatan sebelumnya, KPA Provinsi Banten dapat mengenali permasalahan apa saja yang ditemukan di masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS yang kemudian menjadi bahan penentuan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pencegahan HIV/AIDS dengan mempertimbangkan beberapa hasil analisis dan riset yang sudah ditemukan tersebut.

4.5.2 Tahapan perumusan kebijakan dengan penyusunan strategi

Pada tahapan perumusan kebijakan disini terdapat pengindikatoran yang antara lain yakni penentuan tujuan dan strategi. Berdasarkan hasil analisis dan riset yang telah dilakukan, kemudian KPA Provinsi Banten menentukan tujuan kegiatan. Melihat indikator identifikasi permasalahan dalam tahapan analisis dan riset, perencanaan selanjutnya adalah menetapkan suatu tujuan yang menjadi fokus dalam program Warga Peduli AIDS. Tujuan tersebut ialah agar masyarakat dapat mengetahui dan peduli mengenai permasalahan HIV/AIDS. Dengan ditetapkan tujuan tersebut, kegiatan akan terfokus pada pencapaian tujuan dan dengan adanya tujuan dapat menjadi pertimbangan selanjutnya dalam menetapkan strategi.

Tujuan kedua yang menjadi salah satu tahapan perumusan kebijakan dalam perencanaan program *Harm Reduction* ialah

menekan jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Banten. Hal tersebut juga didasarkan pada pengidentifikasian permasalahan yang didapat dari hasil analisis dan riset yang kemudian hal ini menjadi titik tujuan dicanangkannya program *Harm Reduction* untuk mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba suntik. Lalu tujuan ketiga ialah membangun relasi yang baik dengan instansi. Tujuan ini sangat penting di dalam keberlangsungan semua kegiatan yang direncanakan oleh KPA Provinsi Banten, karena keberhasilan dari suatu kegiatan didasarkan pada relasi dan koodinasi yang baik antara KPA dan Instansi terkait.

Setelah menemukan tujuannya, kemudian KPA Provinsi Banten menentukan strategi komunikasi yang akan membantu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, strategi yang digunakan KPA Provinsi Banten adalah dengan mengadakan pelatihan untuk melatih warga dengan menerapkan materi komunikasi persuasif untuk perubahan perilaku pada program Warga Peduli AIDS. Pada dasarnya titik kunci pada program Warga Peduli AIDS ini adalah mengenai penerapan cara untuk mempengaruhi atau mempersuasi masyarakat. Penggunaan komunikasi perusuasif dibutuhkan karena pada hakikatnya untuk mempersuasi masyarakat itu tidak mudah dan perlu dipelajari melalui orang yang lebih tahu akan cara-cara untuk mempersuasif orang.

Kemudian di dalam program *Harm Reduction*, strategi yang digunakan adalah dengan manargetkan tempat penyediaan jarum suntik yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu untuk strategi yang digunakan pada kegiatan koordinasi dengan instansi, hal yang dilakukan adalah dengan menetapkan sebuah saluran komunikasi utama yang mempertemukan KPA Provinsi Banten dengan instansi dan dapat dijadikan sebagai tempat bertukar pesan atau informasi.

Pada tahapan perumusan kebijakan di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly merujuk ada perencanaan penetapan tujuan dan strategi yang akan digunakan. Tahapan ini lebih mengerucut mempunyai susunan strategi yang jelas. Komisi Penanggulangan AIDS ikut menerapkan indikator penetapan tujuan dan strategi pada tahapan perumusan kebijakan ini.

4.5.3 Tahapan perencanaan program pelaksanaan dengan perencanaan mengenai fasilitas, tenaga, dana, dan sasaran

Perencanaan kegiatan di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly pada tahapan perencanaan program pelaksanaan lebih tersusun dari berbagai aspek, diantaranya yakni mengenai fasilitas, tenaga, dan dana. Pada perencanaan mengenai tenaga yang akan dipilih untuk program Warga Peduli AIDS adalah dengan kualifikasi masyarakat yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan begitu, informasi yang telah didapatkan dari Komisi Penanggulangan AIDS dapat ditransfer atau diinformasikan kembali

kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini sangat penting karena dalam program WPA, masyarakat yang dapat menyebarkan informasi dengan baik akan sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini.

Pemilihan tenaga untuk program *Harm Reduction* adalah tenaga kesehatan sebagai aparat yang dipercaya oleh warga dalam bidang kesehatan. Instansi yang bergerak pada bidang kesehatan menjadi instansi yang dipercaya oleh masyarakat karena permasalahan HIV/AIDS ini adalah permasalahan kesehatan. Tempat yang tepat sebagai penyalur penyediaan jarum suntik untuk program ini adalah puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).

Adapun pada kegiatan koordinasi dengan instansi, tenaga yang dipilih adalah instansi atau OPD yang ikut membantu kegiatan KPA Provinsi Banten sesuai dengan tupoksi instansi tersebut. Di dalam keanggotaan KPA Provinsi Banten sendiri, terdapat 31 instansi atau OPD sudah jelas menjadi tenaga yang melakukan koordinasi untuk segala kegiatan menyangkut pencegahan HIV/AIDS khususnya di Provinsi Banten.

Aspek berikutnya yang harus sudah ditentukan dalam tahapan perencanaan program pelaksanaan adalah dana. Pada dasarnya semua dana atau penganggaran dalam segala kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh KPA Provinsi Banten sudah menjadi tanggung jawab dari KPA Nasional. Penganggaran merupakan aspek yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya rincian mengenai pendanaan suatu

program harus dicanangkan satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Penganggaran didanai oleh APBD dan turun setiap kurun waktu 6 bulan sekali.

Kemudian, aspek yang ikut dipilih pada tahapan perencanaan program pelaksanaan adalah mengenai fasilitas. Fasilitas yang diperlukan pada program Warga Peduli AIDS adalah sebuah pelatihan. Pelatihan tersebut menjadi tempat untuk berlangsungnya pemberian informasi atau pesan yang dilakukan oleh KPA kepada masyarakat. Pelatihan tersebut pada dasarnya disediakan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana) sebagai badan yang mengurus tentang pemberdayaan masyarakat.

Fasilitas yang dibutuhkan untuk program *Harm Reduction* adalah jarum suntik steril yang akan diproduksi sebanyak 1.000 pcs. Dengan disebarinya 1.000 pcs jarum suntik ke beberapa puskesmas diharapkan dapat mengurangi resiko penularan dan jumlah kasus HIV tidak bertambah.

Kemudian untuk fasilitas pada kegiatan koordinasi dengan instansi adalah menggunakan *meeting room* Hotel sebagai lokasi pelaksanaan Rapat Koordinasi. Instansi yang terdaftar di dalam keanggotaan KPA Provinsi Banten adalah sebanyak 31 instansi. Maka dari itu diperlukan tempat yang luas dan nyaman untuk berlangsungnya komunikasi yang efektif.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, terdapat aspek tambahan yang tidak ada dalam model perencanaan komunikasi yang dibuat oleh Philip Lesly. Aspek tersebut adalah sasaran. Pada hakikatnya semua kegiatan yang direncanakan harus mempunyai target atau sasaran yang dituju. Sasaran yang dituju pada program Warga Peduli AIDS adalah masyarakat. Sedangkan untuk program *Harm Reduction*, sasaran yang dituju adalah penasun atau pengguna jarum suntik. Lalu pada kegiatan koordinasi dengan instansi, sasaran yang dituju adalah instansi terkait.

4.5.4 Tahapan kegiatan komunikasi dengan penentuan saluran komunikasi

Pada tahapan ini, yang dilakukan KPA Provinsi Banten adalah melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk berjalannya sebuah pelaksanaan yang sesuai dengan yang diharapkan, KPA Provinsi Banten perlu untuk lebih memperhatikan komunikasi yang dijalinnya. Mengenai bagaimana komunikasi yang dilakukan, menurut model perencanaan komunikasi Philip Lesly, hal yang menjadi penting pada kegiatan komunikasi adalah saluran komunikasi yang digunakan.

Penggolongan mengenai saluran yang digunakan pada kegiatan komunikasi yakni diantaranya kelompok, tradisional, media baru, *Focus Group Discussion*, dan publik. Saluran komunikasi yang digunakan Warga Peduli AIDS adalah saluran kelompok dengan

workshop atau pelatihan kepada masyarakat, saluran media baru dengan adanya Web KPAN dalam E-Library Pusat Informasi AIDS Nasional www.aidsindonesia.or.id, dan saluran komunikasi publik dengan surat kabar.

Saluran komunikasi yang digunakan pada program *Harm Reduction* diantaranya adalah saluran komunikasi tradisional dengan melakukan komunikasi langsung atau tatap muka dengan tenaga kesehatan di puskesmas dengan saluran komunikasi indera manusia. Selain itu saluran komunikasi lain yang digunakan adalah saluran media baru dengan surat kabar online. Selain itu saluran publik juga digunakan yaitu dengan surat kabar. Adapun saluran komunikasi yang digunakan di dalam kegiatan koordinasi adalah saluran tradisional yang masih menggunakan telepon untuk berkomunikasi jika terjadi hal yang mendesak. Kemudian saluran *Focus Group Discussion* juga turut digunakan yaitu pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi.

Menurut tahapan kegiatan komunikasi di dalam komponen organisasi berdasarkan model perencanaan komunikasi Philip Lesly, kegiatan komunikasi lebih terfokus kepada saluran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan di dalam tahapan kegiatan komunikasi di dalam KPA Provinsi Banten lebih kepada proses pelaksanaan komunikasinya. Proses komunikasi pada program Warga Peduli AIDS dilakukan dengan penerapan komunikasi menggunakan sistem ToT (*Training of Trainer*) kepada masyarakat. Proses ToT ini

pada dasarnya lebih kepada pendistribusian informasi dari KPA ke warga, kemudian dari warga ke masyarakat luas. Sedangkan proses komunikasi pada program *Harm Reduction* lebih kepada proses pendistribusian perencanaan mengenai program *Harm Reduction* dari KPA Nasional bersama Kementerian Kesehatan hingga sampai kepada penasun. Sedangkan pada proses komunikasi pada kegiatan koordinasi dengan instansi, dalam Rapat Koordinasi, proses komunikasi terjalin antara KPA Provinsi Banten sebagai komunikator, pengevaluasian sejauh mana pencegahan HIV menurunkan angka kematian dan strategi penanggulangan HIV AIDS sebagai pesan, dan instansi yang termasuk ke dalam keanggotaan KPA Provinsi Banten sebagai komunikan. Sementara untuk *feedback* atau umpan balik yang didapat adalah perencanaan rancangan program kerja yang berasal dari saran dan usul instansi atau OPD di dalam Rapat Koodinasi.

Pada model perencanaan komunikasi Philip Lesly, di dalam komponen organisasi hanya terfokus pada perencanaan yang dibuat oleh organisasi tanpa ada keterlibatan publik di dalamnya. Namun di dalam perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dalam perencanaan kegiatan pencegahan, publik sudah dilibatkan pada tahapan perencanaan program pelaksanaan. Di dalam perencanaan komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten, publik bukan hanya sebagai sasaran dari suatu kegiatan, tetapi publik juga ikut serta di dalam

perencanaan. Sedangkan di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly, publik hanya sebagai sasaran dari kegiatan organisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi komunikasi dalam pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten oleh Komisi Penanggulangan AIDS ditemukan tiga program pencegahan diantaranya adalah Program Warga Peduli AIDS, Program *Harm Reduction*, dan kegiatan koordinasi dengan instansi. Pengimplementasian mengenai model perencanaan komunikasi Philip Lesly dengan ketiga program yang ditemukan dapat dijabarkan dalam beberapa poin di bawah ini, yakni:

1. Tahapan Analisis dan riset pada perencanaan strategi komunikasi dalam indikator diagnosa adalah tingkat pengetahuan yang rendah mengenai penyakit HIV dan cara penularannya, bahaya tentang penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan menghindari kurangnya koordinasi dengan instansi. Kemudian indikator identifikasi permasalahannya adalah mengedukasi masyarakat mengenai penyakit HIV AIDS, menekan pertambahan jumlah kasus HIV dan AIDS, dan menyelaraskan kegiatan pencegahan HIV dengan instansi yang sesuai dengan tupoksinya. Lalu indikator peninjauan kegiatan sebelumnya diantaranya adalah perencanaan ulang kegiatan yang tidak mencapai target dan pengembangan dari kegiatan sebelumnya.

2. Tahapan perumusan kebijakan pada perencanaan strategi komunikasi dalam indikator penetapan tujuan adalah masyarakat mengetahui dan peduli mengenai permasalahan HIV/AIDS, menekan jumlah kasus HIV/AIDS, dan membangun relasi yang baik. Kemudian untuk indikator strategi yaitu mengadakan pelatihan untuk melatih warga dengan menerapkan materi komunikasi persuasif untuk perubahan perilaku, manargetkan saluran komunikasi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat, dan menetapkan sebuah saluran komunikasi utama yang mempertemukan KPA Provinsi Banten dengan instansi dan dapat dijadikan sebagai tempat bertukar pesan atau informasi.
3. Tahapan perencanaan program pelaksanaan pada perencanaan strategi komunikasi dalam indikator tenaga adalah masyarakat dengan kemampuan komunikasi yang baik, tenaga kesehatan sebagai aparat yang dipercaya oleh warga dalam bidang kesehatan, dan instansi atau OPD yang ikut membantu kegiatan KPA Provinsi Banten sesuai dengan tupoksi instansi tersebut. Lalu pada indikator dana ialah dianggarkan oleh APBD yang turun setiap 6 bulan sekali dan penganggaran diajukan pada saat pembahasan rancangan program kerja yang diusung 1 tahun sebelumnya pada Rapat Koordinasi. Indikator pada fasilitas diantaranya adalah program pelatihan yang difasilitasi oleh BPMPKB, jarum suntik steril sebanyak 1.000 pcs, dan hotel atau *meeting room* sebagai lokasi pelaksanaan Rapat

Koordinasi. Kemudian indikator pada sasaran adalah masyarakat, penasun, instansi terkait.

4. Tahapan kegiatan komunikasi pada perencanaan strategi komunikasi lebih kepada pelaksanaan melalui saluran komunikasi yang diantaranya adalah *workshop*, Web KPAN dalam E-Library Pusat Informasi AIDS Nasional www.aidsindonesia.or.id, surat kabar, komunikasi tatap muka, surat kabar online, telepon, dan Rapat Koordinasi.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa pengimplementasian mengenai model perencanaan komunikasi Philip Lesly tidak semua digunakan. Pengimplementasian perencanaan komunikasi hanya sampai pada komponen organisasi sebagai penggerak kegiatan pencegahan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Komponen publik yang terdapat di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly tidak dianalisis karena Komisi Penanggulangan AIDS tidak melakukan perencanaan komunikasi yang terstruktur mengenai umpan balik dan evaluasi. Jadi pengaplikasian model perencanaan komunikasi Philip Lesly hanya sampai pada tahapan kegiatan komunikasi saja.

Lalu terdapat perbedaan antara model perencanaan komunikasi Philip Lesly dengan perencanaan komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Pada model perencanaan komunikasi Philip Lesly, di dalam komponen organisasi tidak ada keterlibatan publik di dalamnya. Sedangkan di dalam perencanaan komunikasi Komisi Penanggulangan

AIDS Provinsi Banten, publik bukan hanya sebagai sasaran dari suatu kegiatan, tetapi publik juga ikut serta dan terlibat di dalam perencanaan. Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam model perencanaan komunikasi Philip Lesly, publik hanya sebagai sasaran dari kegiatan organisasi.

5.2 Saran

Peneliti telah menyimpulkan hasil penelitian dan analisis berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Hal selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah memberi saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi pemerintah KPA Provinsi Banten dalam melakukan strategi komunikasi dalam kegiatan pencegahan HIV AIDS. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Pembahasan mengenai strategi komunikasi telah menjadi aspek penting terutama dalam bidang ilmu komunikasi khususnya komunikasi di dalam organisasi. Untuk itu strategi harus disusun dengan baik. Keberhasilan dari suatu kegiatan penanggulangan pada dasarnya dipengaruhi oleh proses perencanaan yang baik yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan komunikasi.
2. Sebuah organisasi pemerintah seperti KPA Provinsi ini harus bisa menciptakan iklim komunikasi yang baik. Permasalahan mengenai dana APBD tidak menjadi alasan terjadinya iklim komunikasi yang buruk di dalam organisasi tersebut.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pengurus KPA Provinsi Banten dan dapat menerapkan model perencanaan komunikasi Philip Lesly ini ke dalam perencanaan kegiatan pencegahan yang akan dibuat di masa mendatang.

5.2.2 Saran Praktis

1. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang sedang melakukan penelitian, khususnya mengenai strategi komunikasi pemerintahan dalam kegiatan preventif dalam penanggulangan HIV AIDS.
2. KPA Provinsi Banten diharapkan terus menghasilkan program-program penanggulangan HIV AIDS dan terus menerus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi di wilayah Provinsi Banten.
3. OPD-OPD di wilayah Provinsi Banten yang terdaftar pada keanggotaan KPA Provinsi Banten diharapkan lebih memanfaatkan keberadaan KPA, diharapkan dapat lebih memperbanyak mengenai program HIV AIDS karena permasalahan HIV AIDS adalah permasalahan yang kompleks dan harus ditanggulangi oleh banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Anwar. 1994. *Strategi Komunikasi*. Bandung: CV Amrico.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auliani, Mia. 2017. 'Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kota Samarinda', eJournal Administrasi Negara, vol. 5(1), p. 5293-5306.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, Onong Uchjana. 1997. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 1998. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Elvinaro, Ardianto. 2010. *Metoda Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: YA3.

- Firdaus, Muhammad. 2008. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Askara.
- Hasan, Fajar Muhammad. (2013, 15 Juli). *Menggugat istilah ODHA*. Diakses pada 24 Januari 2018 pukul 14.46 WIB, dari https://www.kompasiana.com/fajarmhasan/menggugat-istilah-odha_5529ba796ea8340a72552d47
- Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten (2016). *Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten*, Gubernur Banten, Serang.
- Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten (2017). *Brosur Mengenal Penyakit IMS, HIV & AIDS*. Serang: Dinas Kesehatan.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Liliwari, Alo. 1991. *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Martha. 2016. 'Penelitian Terbaru tentang HIV Memberikan Hasil yang Menjanjikan', *detik*. p. 3109694.
- Moleong, J. Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. Rakhmat, Jalaluddin. 2010. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Kampanye Public Relation*. Jakarta: Raja Gofindo Persada.
- Sartika, Ariny. 2015. 'Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS di Kota Samarinda', eJournal Ilmu Komunikasi, vol. 3(1), p. 17-30.
- Sihabudin, Ahmad. Winangsih, Rahmi. 2012. *Komunikasi Antar Manusia*. Serang: Pustaka Getok Turl. Hlm. 37.
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, H.A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax: 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
 url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 17 /UN.43.6.2/PG/2018
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

24 Januari 2018

Kepada Yth.
 Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten
 di
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Trina Dhamartika
 NIM : 6662142661
 Semester : 8
 Mata Kuliah : Skripsi
 Judul : Jaringan Komunikasi dalam Penanggulangan AIDS di Provinsi Banten (Studi Kasus pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten)
 Data diperlukan : Wawancara dan data Instansi terkait KPA

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Komunikasi

 Dr. Rahmi Winangsih, M.Si
 NIP. 196810192005012001

Lampiran 2

CATATAN BIMBINGAN
Murni, M. S. Pd
Ari, M. S. Pd

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PABAF DOSEN
1.	24/11/18	07 Bab 1 re judul	Ari
2.	12/01/18	Uraian singkat mengenai pengembangan layanan komunikasi: layanan (Studi kasus 8' KPA Banken)	Ari
3.	12/01/18	Bab 1.	Ari
4.	12/01/18	Bab 1 (revisi)	Ari
5.	05/02/18	Bab 1 - 3 ACC dan UMF selektifnya.	Ari
6.	08/03/18	DAFTAR	Ari
7.	09/04/18	Revisi pasca outline - Bab 2 → Teori	Ari

Catatan: Jadwal tetap maka mahasiswa dengan meeting meeting pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap maka).

Revisi: Sifatnya F2S2C Ukhira

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PABAF DOSEN
8.	20/04/18	Revisi Bab 2 - Reduan Redoman Wawancara (Via WhatsApp)	Ari
9.	07/05/18	- Revisi Redoman Wawancara (Via WhatsApp)	Ari
10.	08/05/18	- ACC Redoman Wawancara (Via WhatsApp)	Ari
11.	25/06/18	- revisi: 145 TV Aze siemens	Ari
12.	13/02/07/18	Aze (Ukhira)	Ari

Catatan: Jadwal tetap maka mahasiswa dengan meeting meeting pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap maka).

Revisi: Sifatnya F2S2C Ukhira

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

1. Ada berapa jumlah anggota KPA Provinsi Banten?
2. Bagaimana strategi komunikasi dalam menyebarluaskan pesan atau informasi ke seluruh divisi dan anggota KPA?
3. Bagaimana perencanaan strategi komunikasinya?
4. Bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi dalam aliran komunikasinya? (apakah satu arah/dua arah/transaksional?)
5. Bagaimana komunikasi yang disampaikan KPA kepada lembaga formal seperti dinas-dinas terkait?
6. Bagaimana cara menangani hambatan tersebut?
7. Bagaimana strategi komunikasi dalam pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Banten?
8. Bagaimana strategi komunikasi dalam perencanaan pemilihan medianya untuk segala kegiatan pencegahan yang dilakukan?
9. Media apa yang digunakan KPA dalam menyebarluaskan informasi kepada seluruh divisi KPA Provinsi Banten?
10. Mengapa KPA menggunakan media tersebut dalam menyebarluaskan informasi?
11. Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas penanggulangan HIV AIDS?
12. Bagaimana perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan HIV AIDS?
13. Bagaimana pelaksanaan dari strategi komunikasi tersebut?
14. Siapa saja instansi formal yang sering terlibat di dalam penanggulangan HIV AIDS?

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Key Informan (Informan 1)

Nama : Dr. Encep Mukardi, M.A.R.S
Jabatan : Sekretaris KPA Provinsi Banten
Jenis Informan : Key Informan
Tanggal wawancara : 9 Mei 2018

1. Bagaimana strategi komunikasi dalam menyebarluaskan informasi ke seluruh divisi dan anggota KPA?

Jawaban :

Komunikasinya melalui sektor terkaitnya kan dinas kesehatan, jadi penanggulangan HIV AIDS terkoordinasi mulai dari pusat, kemudian ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota. Dari KPAN, strateginya dari pusat. Seperti yang saya sampaikan, visinya adalah 3 zero, itu dikomunikasikan dari pusat melalui SRAN (Strategi Rencana Aksi Nasional), itu semuanya sudah dijabarkan di sana. Kalau disana kan sama dengan di Provinsi, melalui kementerian, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, nah anggotanya ya kementerian-kementerian. Nah itu digodok disana, kemudian kita yang melaksanakan.

Kemudian dari sini kita menjabarkannya SRAN itu ke Provinsi. Kemudian dari ke Provinsi baru ke Kabupaten Kota. Kemudian dari provinsi sendiri sama dengan di pusat, jadi KPA dengan sektor dinas kesehatan menjabarkan strategi nasional tersebut kemudian kita berkoordinasi dengan divisi dan anggota yang lain di KPA Provinsi. Kemudian dari anggota dengan tataran provinsi tersebut yang melaksanakan. Jadi KPA ini bukan melaksanakan sendiri, tapi yang melaksanakannya itu anggotanya, ada dinas kesehatan, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dan termasuk juga dari TNI, POLRI. Dan

pengkoordinasian mengenai SRAN tersebut dilakukan dalam rapat internal rutin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Kemudian kalau yang dari kabupatennya, melalui KPA Provinsi ke KPA Kabupaten. Dari KPA Kabupaten juga berkomunikasi antara KPA dengan anggotanya, anggotanya ya dinas-dinas.

2. Apakah KPA hanya menjadi jembatan antara KPAN dan KPA Kabupaten kota?

Jawaban:

Itu kan kebijakan, kebijakannya itu sama dengan pemerintah yang lain juga. Masyarakat juga. Jadi kebijakan itu kan dilaksanakannya di masyarakat. Nah yang melaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dinas sosial ke masyarakat juga kan, misalnya memberikan nutrisi kepada ODHA yang juga merupakan masyarakat.

Jadi kalau kabupaten kota melaksanakan sendiri, direncanakan dan dibiayai oleh kabupaten kota. Nah kalau yang di provinsi, melaksanakan sendiri yang dibiayai oleh Provinsi. Seperti itu.

3. Bagaimana komunikasi yang disampaikan KPA kepada lembaga formal seperti dinas-dinas terkait? Adakah perbedaan antara komunikasi ke dinas dan komunikasi ke komunitas?

Jawaban:

Beda. Kalau di sekretariat disini, sekretaris kemudian pengelola administrasi, pengelola program, pengelola keuangan. Kemudian pengelola-pengelola ini ada anggotanya, seperti yang sudah ada di struktur. Nah dari sekretaris ke 3 pengelola itu menyampaikan alur komunikasinya, kemudian dari pengelola ini ke anggotanya. Kemudian dari masing-masing pengelola tersebut merencanakan kegiatan sendiri. Kemudian kalau pelaksanaannya, masing-masing pasti menjalankannya sesuai dengan rencana nya.

Bagi yang ke dinas-dinas alur komunikasinya kita dilakukan dengan cara pertemuan, disampaikan program-programnya. Kemudian kita juga mengunjungi anggotanya untuk berkomunikasi, nanti

anggotanya sendiri misalnya Dinas Tenaga Kerja merencanakan dan menganggarkan yang dikerjakan oleh dia, si dinas tersebut. Dinas tersebut bisa bekerja sama dengan Pramuka, dengan pesantren, dan juga komunitas.

4. Bagaimana strategi komunikasi pemilihan media untuk pendistribusian informasi ke KPA?

Jawaban:

Kalau untuk ke OPD, karena mereka sibuk dan diantaranya ada pejabat dari OPD, jadi ya kita medianya yaitu dengan pertemuan, dengan surat, dengan kunjungan, bisa tertulis maupun mendatangi langsung bisa diundang ke sini, bisa kita yang kesana. Untuk media lain yang digunakan itu *handphone* melalui aplikasi *whatsapp*, surel seperti email. Tetapi media yang lebih efektif dengan pertemuan.

Untuk mengadakan pertemuan, dengan menggunakan *whatsapp* cukup efektif, tidak hanya untuk pertemuan, tetapi juga untuk menyelesaikan sesuatu yang paling cepat ya itu.

5. Adakah hambatan dalam penggunaan media tersebut?

Jawaban:

Sejauh ini sih tidak ada. Kendalanya itu kalau tidak ada yang menyampaikan. Tapi umumnya sih menyampaikan. Cuma kalau misalnya di suatu tempat ataupun ada masalah yang tidak disampaikan kita tidak tahu, jadi komunikasinya dengan orang-orangnya harus lancar. Tapi selama ini sih lancar, mungkin saja ada yang tidak di laporkan, tetapi selama ini masalah-masalahnya selesai saja.

6. Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas penanggulangan HIV AIDS?

Jawaban:

Di kita ini bukan hanya di Banten saja, tetapi di negara ini yang menjadi masalah itu adalah ketidaktahuan masyarakat tentang penanggulangan HIV/AIDS. Jadi dengan ketidaktahuan itu, kita harus memberitahu. Nah itu kuncinya. Jadi memberitahu masyarakat, nanti

masyarakat meresponnya dan melaksanakannya itu dengan benar. Nah itu yang menjadi masalah. Kalau selama ini karena tidak tahu jadi tidak benar yang dianggap dan dikerjakan oleh masyarakat.

7. Adakah kategori masyarakat yang aktif dalam penanggulangan HIV AIDS ini?

Jawaban:

Biasanya aktif itu karena tahu. Udah tahu lalu aktif. Itu ada dari mahasiswa-mahasiswa, dari pelajar-pelajar dan menyampaikan kepada lingkungan sekitarnya. Selain itu kita juga melatih 40 tentara TNI, kemudian 40 POLRI, kemudian 60 remaja yang dilatih untuk keaktifan dalam masalah HIV, jadi keaktifan itu ditumbuhkan juga dari membina mereka, melatih untuk menjadi kader untuk aktif.

8. Adakah program-program yang telah dijalankan KPA untuk membangun partisipasi masyarakat?

Jawaban:

Ada misalnya di TV ada Talkshow, kemudian di radio juga sama, nah bukan hanya dikerjakan oleh kita, karena KPA kan tidak mengerjakan sendiri, nah dari kader-kader yang dilatih kemudian menyampaikan, karena tidak mungkin kita sendiri yang mengerjakan sendiri, jadi ada jejaring dari adanya kader yang terus menyampaikan lagi menyampaikan lagi, nah dari situ keaktifannya.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara Informan Utama (Informan 2)

Nama : Khaerunnisa, S.Ikom

Jabatan : Koordinator Bidang Administrasi Umum KPA
Provinsi Banten

Jenis Informan : Informan Utama

Tanggal wawancara : 11 Mei 2018

1. Bagaimana media yang digunakan KPA dalam menyebarluaskan informasi kepada seluruh divisi KPA Provinsi Banten?

Jawaban:

Kalau informasi dari KPA Nasional sih biasanya via email, terus koordinasi itu lewat *telephone*, misalnya kalau terkait program dari KPAN-nya berhubungan sama yang pemegang program juga, kalau terkait administrasi berhubungan sama pemegang administrasinya, jadi gitu komunikasinya. Kalau lebih sering sih ke email, soalnya ada bukti, kalau *by phone* memang lisan gitu kan, khawatir pembicaraannya an tidak bisa *ter-record*.

Kalau pertemuan dengan KPAN, dulu sih kita ada pertemuan evaluasi per 6 bulan sekali seluruh Indonesia tidak hanya Banten saja. Itu didanainya sama Global Fund. Tapi karena Global Fund. nya juga programnya berakhir di Indonesia, jadi pertemuan-pertemuan itu tahun ini belum ada, jadi terakhir itu tahun 2017.

Yang dibahas sih tentang evaluasi program, kebijakan dan lain sebagainya.

2. Bagaimana perencanaan strategi komunikasi KPA dalam pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten?

Jawaban:

Kalau untuk perencanaan, karena ini kan adalah program donor, jadi program donor itu *template*, kita cuma jalanin saja. Gak bisa kita kaya mengusulkan, seperti misalnya di banten ini gak bisa dijejalin dengan jarum suntik, karena pengguna napza suntiknya sudah tidak ada, jadi tidak bisa dan akhirnya kita menolak program itu. Walaupun mau nolak itu proses nya lama banget. Harus ada *assesment* dari pihak terkait yaitu dari Dinas Kesehatannya lah, dari layanan Puskesmasnya, dan lain sebagainya.

Jadi pelaksanaan programnya itu *Top Button*, jadi dari atas ke bawah dan di bawah itu tinggal ngeleksanain saja. Kalau misalkan kita bicara jarum suntik, kalau dulu mungkin *trend* kan bisa berubah, misalnya kalau dulu jarum suntik banyak gitu kan penggunaannya, tapi kan lambat laun seperti putau nya juga susah didapetin, kalaupun ada pasti mahal, orang-orang sudah mulai bergeser, dan sekarang *trend*-nya bergeser transaksi seksual, tapi program jarum suntik itu masih ada. Dan juga kita an kalau sama donor harus punya target, misalnya program jarum suntik ini harus diproduksi sebanyak 1.000pcs, tapi kalau *user* nya gak ada mau dikemanain tuh jarum suntik, dan akhirnya target kita tidak tercapai dan hampir semua sih gak cuma di Banten. Nama programnya Harm Reduction (HR), jadi pengurangan dampak buruk terhadap penggunaan narkotika suntik. Program itu ada di hampir seluruh daerah di Indonesia tapi tidak bisa berjalan dengan maksimal, karena seperti tadi, gak cuma di Banten saja putau itu sulit didapati, hanya segelintir orang yang masih pake. Program jarum suntik ini disebar melalui puskesmas, jadi satu paket itu sudah ada jarum suntik, ada alkohol swab. Kalaupun mereka mau pake, mereka gak boleh *sharing needle* atau berabagi jarum suntik. Oleh karena itu diberikan jarum suntik dari puskesmas untuk memutus penularan HIV. Tapi disisi lain untuk mengundangnya juga susah, terus BNN juga punya target, polisi juga punya target untuk memberantas, itu kan kontradiktif.

Untuk evaluasi, HR itu akhirnya di Banten, seperti kita tahu di Tangsel itu sempet beberapa saat ditutup, karena SOP agak ribet. Jadi kan masing-masing daerah punya otonomi daerah, misalnya di Tangsel harus pake fotokopi KTP sementara Tangerang Kota bisalah *by name* dulu. Jadi akhirnya penasun atau pengguna jarum suntik kan jadi takut, kalau dia nyerahin KTP terus datanya di *share* ke BNN nanti dia diciduk, gitu jadi akhirnya banyak penasun di Tangsel mereka lebih *safe* aksesnya ke Jakarta Selatan, jadi itusih banyak masalah-masalah yang akhirnya berimbas ke program-program ini.

Kalau dari perencanaan, misalnya di daerah kita nemu ini nemu itu, nah di pertemuan nasional kan kita bahas dan pasti dibahas. Bahasannya apa sih kendalanya, mengapa di Banten gak bisa nyampe target ini, terus kita punya alasannya bahwa di lapangan faktanya sepeti itu dan jika dipaksain program itu untuk berjalan tidak akan maksimal. Jadi akhirnya dari situ baru nanti *re-programming*, apakah program ini tetap berjalan, walaupun tetap berjalan stoknya tetap diberikan tapi jumlahnya dikurangkan dari yang tadinya ribuan mungkin bisa menjadi ratusan.

Pada saat pertemuan nasional kita akan membahas hal tersebut, seluruh daerah akar permasalahannya apa seperti kebijakan, karena donor itu stimulan atau cuman sementara dan pancingan saja dan nantinya diharapkan dana daerah (dana APBD) ini yang besar, donornya itu turun, turun, turun, dan bahkan sampai menghilang. Kan tahun ini sudah selesai nih kontraknya, jadi kalau misakan daerah yang gak punya kebijakan, gak punya peraturan buat ngendorong KPA-nya supaya dapat anggaran nah itu juga kan jadi permasalahan. Nah nanti diobrolin lagi di pertemuan nasional.

3. Bagaimana perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan KPA agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan HIV AIDS?

Jawaban:

Kita punya Warga Peduli AIDS. Dulu itu memang diinisiatifkan sama anggarannya “Donor”. Terus akhirnya kita ngedorong nih OPD terkait, misalnya BPPMD (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat). “Ayo dong BPPMD bikin kegiatan yang intinya sih bisa ngumpulin warga, bisa ngebentuk warga peduli AIDS!”, nah itu akhirnya berhasil. BPPMD bikin beberapa pertemuan, terutama di tiga wilayah yang tidak di-*cover* sama Donor. Seperti Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Lebak, sama Kota Serang. Nah itu kan tidak di-*cover* sama Donor.

Jadi dulu memang diinisiatifkan dari Donor, nah akhirnya kan dana APBD bisa mem-*backup* itu, terus Kota maupu Kabupaten Kota “ayo dorong!”. Nah kalau misalkan nggak ada, kita mendorong OPD terkait, misalnya BPPMD, kalau sekarang kan pecah, ada BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana) sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah yang berkaitan dan pokoknya bisa ngumpulin masyarakat itu dinas mana, ya kalo nggak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya BPMPKB, karena ibu-ibu KB, ibu-ibu Kader Posyandu. Kalau misalkan ngandelin KPA saja HIV AIDS itu tidak bisa optimal. Jadi harus semua pihak. Itu juga diatur di Permen-nya bahwa keterlibatan atau peran serta masyarakat untuk program pencegahan HIV itu kan diharapkan sekali. Balik lagi kalau masyarakatnya juga gak *aware*, misalnya masih ada stigma gitu kan, karena akhirnya gini, kenapa masyarakat menstigma? Karena masyarakat itu nggak punya pengetahuan. Nah untuk memberitahu itu, “oh harus tugasnya KPA nih!”. Nah KPA juga kan terbatas, artinya memang semua program itu penting, termasuk ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu jadi akhirnya tidak stigma. Tapi misalnya kalau semua harus ditangani KPA nggak akan selesai. Jadi tadi tuh, misalnya kita melatih nih, melatih misalnya ada 100 warga yang tersebar di Banten ada 8 Kabupaten Kota. Nah orang-orang yang dilatih ini diharakan kayak TOT, mereka bisa mentransfer ilmunya ke warga setempat. Jadi pada program

WPA ini, kita ambil kader-kader posyandu dulu nih yang biasa bisa ngomong, bisa mempersuasif orang, nah dari situ mereka bisa mentransfer ilmu sehingga diharapkan masyarakat tuh nggak menstigma lagi bahan kalau misalnya memang ada kasus di daerahnya, ayo sama sama dibantu gitu loh. Kalau misalnya mereka orang miskin gimana? Ayo kita kan punya JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran), nah kader posyandu atau kader-kader kesehatan tahu, “oh ini untuk mengakses JKN PBI itu bagaimana sih tahapannya?”. Jadi diharapkan seperti itu, karena balik lagi kalau misalnya cuma ngandelin orang KPA, ya kami juga kan ada keterbatasan SDM.

Kami juga pada dasarnya harus mempunyai *skill* atau kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak. Terutama teman-teman Bidang Program harus mau tidak mau untuk melakukan itu, karena kan mereka di-*hire* seperti. Pada saat seseorang mempunyai informasi, diperhatikan, dan di-*share* lagi tuh sama orang lain. Karena saya juga belajar mengenai komunikasi, dan saya dulu juga sempat di Bagian Program, jadi ilmu komunikasi tuh kepakai. Buat mempersuasif orang tuh kan gak gampang, apalagi untuk mengubah *mainset* orang, mengubah perilaku orang, dan itu memerlukan waktu yang lama. Dan kalau misalkan kita kerjakan sendiri juga pasti tidak bisa. Kita juga harus punya ranting, seperti contohnya ada teman-teman Forum Remaja Banten, ada teman-teman Genre, ada teman-teman PMI, teman-teman KSR, nah itu diharapkan teman-teman remaja juga dapat mentransfer ilmu tersebut.

Misalkan Warga Peduli AIDS di Kecamatan Labuan, kita punya kemarin itu hasil kegiatannya difasilitasi sama BPPMD, itu tahun 2016. Akhirnya dibentuklah WPA Kecamatan Labuan, terus di Sawarna juga pernah dibentuk. Nah itu hasil kegiatan yang difasilitasi oleh BPPMD. Memang di Kota Serang tidak masuk, tapi KPA-nya membentuk itu ada, KPA Kota Serang-nya yang membentuk WPA di Kota Serang.

4. Apa saja hambatan yang biasa dialami oleh KPA dalam kegiatan pencegahan yang dilakukan?

Jawaban:

Satu, tingkat pendidikan. Karena gini, kalau kita ngasih tahu “HIV AIDS adalah Human Immunodeficiency.....” aduh itu nggak bakal sampai pesannya. Tapi kita gunain bahasa yang sipel, “pokoknya ini adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh”. Nah dalam hal tersebut juga kan perlu *skill*. Kalau misalkan kita maksain untuk berbicara yg susah biar sesuai dengan yang di teks, tapi lihat *audiens*-nya. Balik lagi kalau *audiens*nya mahasiswa mungkin mengerti, walaupun nggak semuanya mengerti bahasa Inggris, tapi *at least* kita belajar. Tapi kalau masyarakat yang tingkat pendidikannya kita nggak tahu mungkin mereka juga nggak sekolah. Jadi tingkat pendidikan punya dampak akhirnya untuk menerima informasi dari kita.

Terus kendala ini adalah komunikasi. Kita menyampaikan ke mereka, nah mereka itu nggak dilatih kan untuk gimana cara ngomong ke orang lain lagi, karena itu kan cuman ngetrasfer ilmu saja. Tetapi kalau ToT (Training of Trainer), itu beda lagi. Misalkan ada slot materi komunikasi nih, seperti Public Speaking, nah nanti kan mereka punya kesempatan buat “ayo yang kemarin sudah dapat informasi apa saja, silahkan bicara di depan”, diberi kesempatan bagaimana caranya menyampaikan informasi. Nah itu memang sedikit sekali, bahkan bisa dibilang tahun kemarin tidak ada.

Kalau seseorang mempunyai kemampuan buat mengolah informasi yang didapatnya dan mempunyai *skill* komunikasi yang bagus pasti kan bisa menyampaikan. Tapi kalau misalkan saya menyampaikan ke seseorang yang tidak sekolah tinggi atau bahkan SD pun nggak tamat, nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, pada akhirnya informasinya cuman mentok di dia doang, tidak menyebar ke yang lain. Nah itu, kemampuan komunikasi dari *audiens* yang kurang.

Terus ini juga penting nih, kalau bikin pelatihan yang *audiens*-nya banyak, narasumbernya kan pasti satu, itu berpengaruh banget. Orang yang di belakang nggak akan denger kita. Jadi konsepnya kalau kayak *classmeeting* gitu, nggak akan nangkap yang dibelakang. Yakin kare aku mengalami itu. Tapi kalau kita bikin kelas belajar, entah model U, entah mungkin melingkar, partisipan dari *audiens*-nya juga dipancing banget, dari misalnya 100 saya yakin 45% nya bisa nangkap, 55% nggak usah diharep. Tapi kalau misalnya *classmeeting* yang dibelakang sibuk sendiri, ada yang ijin keluar. Jadi kalau misalkan cuman seremoni pertemuan pasti akan begitu, tapi kalau kita ngadain pelatihan, ya namanya kan ikut pelatihan, orang yang ngikut pelatihan ini minimal dia harus bisa ngasih informasi ke orang lain.

Beberapa pertemuan akhirnya kita sepakat kalau ini buat melatih, kita jangan buat *classmeeting*. Kadang kita minta sama pihak hotel untuk merubah. Terus juga partisipan dari *audiens* juga harus intens. Kita kan biasanya ada kesepakatan belajar kan kalau dalam pelatihan ya, misalkan *handphone* di *silent*, fokus sama pemateri, kalau ada yang mau tanya silahkan bertanya. Kalau itu sudah disepakati kan sudah enak.

Jadi kalau saya kebiasaannya muter ya, saya nggak mau seperti *classmeeting*, karena kalau *classmeeting* saya yakin banget *audiens* akan nggak fokus. Jadi bagaimana caranya sih dalam 5 menit pertama komunikator bisa mendapatkan perhatian dari *audiens*? Nah itu kan ada *skills* nya kan. Kalau perhatian *audiens* sudah tertuju kepada kita kan berarti mereka fokus. Nah kalau *audiens* sudah mulai gelisah nih, misalkan ketika ada pembicara yang panjang lebar menerangkan materinya. Tapi lihat lagi *audiens*-nya, kalau mereka sudah mulai gelisah mungkin di *break* dulu materinya, kasih konten *refresh* seperti *games-games* dulu supaya mereka nggak ngantuk karena jam-jam rawan kalau jadi pembicara itu setelah jam makan siang. Orang udah kenyang, terus bakal ngantuk dengerin orang ngomong.

Nah nanti kalau mungkin teman-teman dapat kesempatan untuk menjadi pembicara dan ada di jam-jam rawan, itu harus bisa bangkitin suasana, balikin emosinya *audiens*. Karena itu nggak gampang.

Dan memang keterlibatan *audiens* itu penting banget. Kalau mereka diem, ditanya “ngerti?”, diem. Ditanya “nggak ngerti?”, diem. Itu susah. Jadi balik lagi ke si pembicaranya, kalau dia sudah tau situasinya begitu sebaiknya jangan diterusin. Bikin konten hiburan yang bisa balikin suasana dan perhatian si *audiens*.

Terkadang juga kalau sedang ada diskusi kelompok, ada pembicara yang pada dasarnya dia tidak tahu jawabannya yang ditanyakan oleh *audiens*. Kemudian tekniknya adalah pembicara tersebut melempar kembali pertanyaannya ke *audiens*. Dan kalau misalkan pembicaranya sudah benar-benar tidak tahu jawabannya, mungkin bisa disajikan dengan kata-kata yang *packaging*-nya yang manis. Memang pembicara tidak tahu tapi bagaimana ya cara ngomongnya supaya tidak terlalu ketahuan kalau si pembicara tidak mengetahui informasi yang ditanyakan. Jadi di *packaging* yang manis saja. Seperti contohnya bisa dengan inisiatif meminta informasi pribadi *audiens* seperti nomor *handphone* untuk memberikan informasi yang belum bisa disampaikan pada saat itu. Hal tersebut supaya mereka tidak penasaran, terutama bagi yang bertanya.

Lampiran 6

Transkrip Wawancara Informan Pendukung (Informan 3)

Nama : Jordan Jempormase
 Jabatan : Koordinator Bidang Program KPA Provinsi Banten
 Jenis Informan : Informan Pendukung
 Tanggal wawancara : 11 Mei 2018

1. Bagaimana komunikasi instansi kepada pengurus KPA dalam pendistribusian informasi mengenai pencegahan HIV AIDS?

Jawaban:

Sebenarnya secara fatual, saat ini yang kita lakukan dan sudah kita lakukan memang lebih bersiat informal. Itu mayoritasnya seperti itu. Tapi yang bersiat formal itu biasanya di dalam forum Renja OPD dimana kita diundang dan di dalam forum Renja OPD itu sendiri kita mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan tupoksi OPD itu sendiri, khususnya untuk pengendalian HIV AIDS. Misalnya Dinas Sosial berperan untuk pengendalian HIV AIDS ini di bagian mananya. Ada saran-saran kegiatan yang kita sampaikan ke mereka lewat pertemuan forum rencana kerja OPD tersebut. Nah itu yang kita sampaikan. Dinas Sosial lebih ke mitigasi karena kalau ranah kesehatan itu bukan ranah mereka, itu lebih ke Dinas Kesehatan. Nah kalau untuk mitigasi lebih pada bantuan-bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat khususnya ODHA, itulah menjadi ranah dari Dinas Sosial atau misalnya Dinas Tenaga Kerja karena ada yang namanya program HIV AIDS di tempat kerja, dan itu *include* ke dalam pelaksanaan program K3 yang ada di tiap perusahaan. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita usulkan pada saat itu.

Dalam forum rencana kegiatan, KPA turut diundang di dalamnya. Ada dari BP3AKKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana), itu kan ada tenggat waktu

yang diberikan oleh aturan bahwa di dalam perencanaan program 1 tahun kedepan, nah di dalam tahun berjalan itu sudah harus dibuat rancangan program kerjanya. Nah di dalam rancangan program kerja itu dibuatlah sebuah pertemuan, di dalam pertemuan itu ada forum rembuk, ada usul dan saran. Jadi dibuat tabel aatau matrix kegiatan untuk tiap-tiap OPD. Usulan dari mitra kerja terkait dengan OPD-nya mereka itu apa, nah pada saat itulah disampaikan.

2. Media apa saja yang digunakan KPA dalam menyebarkan informasi kepada seluruh divisi KPA?

Jawaban:

Karena ini lebih bersifat pertemuan, jadi kita pake acara rapat. Ataupun bisa bertatap muka langsung kalau misalnya ini informal, atau *by telephone*. Singkat katanya = semua cara kita pakai asal itu halal dan tujuannya tetap untuk pengendalian HIV AIDS.

3. Bagaimana cara-cara yang dilakukan KPA agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan HIV AIDS?

Jawaban:

Bagaimana kita menggerakkan masyarakat? Ada yang namanya Warga Peduli AIDS. Warga Peduli Aids inilah yang sebenarnya dibentuk dan diberdayakan oleh masing-masing KPA Kabupaten Kota, baik itu dikoordinir, dibimbing, dibina. Kenapa Warga Peduli AIDS ini menjadi bagian terpenting di dalam upaya pengendalian HIV AIDS, karena ini adalah amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2007. Selain pembentukan komisi ada pemberdayaan masyarakat, terkait dalam upaya pengendalian HIV AIDS di daerah. Karena itu menjadi salah satu tupoksi dari KPA, memberdayakan masyarakat lewat tadi. Karena juga kalau upaya ini hanya dilakukan oleh unsur pemerintah pasti tidak dilakukan. Maka dari itu ada LSM penggiat HIV, peduli HIV, ada komunitas penggiat HIV, ada Warga Peduli HIV AIDS. Nah inilah yang kita bentuk, kita bina, kita bimbing agar supaya mereka bisa berkolaborasi dan bekerja bersama-sama mengendalikan HIV AIDS sesuai dengan tupoksinya mereka.

Lampiran 7

Transkrip Wawancara Informan Pendukung (Informan 4)

Nama : Imas Chumaeroh, SE
 Jabatan : Koordinator Bidang Keuangan KPA Provinsi Banten
 Jenis Informan : Informan Pendukung
 Tanggal wawancara : 15 Mei 2018

1. Media apa yang digunakan KPA khususnya dalam Bidang Keuangan dalam menyebarluaskan informasi ke seluruh divisi dan anggota KPA?

Jawaban:

Kalau di kita sih biasanya ada *whatsapp group* ya, kita menggunakan grup itu. Kayak KPA Provinsi, misalkan ada kegiatan yang *urgent*, terus ada hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan. Kalau lagi kegiatan pertemuan itu kan biasanya suka ada yang ditanyakan sama orang yang tidak hadir, nanti bisa dijawab dan didiskusikan di sana. Terus kalau misalkan ada informasi mengenai adanya ODHA baru di Lebak nanti bisa di *share* di *group*.

Dari KPAN kan biasanya ngasih dana ke KPA Provinsi dan kita yang menyebarkan ke Kabupaten Kota, dan yang bertanggung jawab untuk itu ya KPA Provinsi. Jadi kalau KPAN nggak akan menanyakan ke KPA Kabupaten Kotanya, pasti menanyakannya ke KPA Provinsi dan kita yang menanyakan ke Kabupaten Kotanya. Jadi koordinasi antara bagian keuangannya, berjenjang.

2. Bagaimana proses aliran komunikasi yang dilakukan KPA khususnya dari Koordinator Bagian Keuangan dalam pendistribusian informasi kepada instansi-instansi atau OPD yang merupakan anggota KPA?

Jawaban:

Kalau dinas terkait kan tidak ada untuk masalah anggarannya ya, jadi kalau kita mau berkumpul dengan anggota KPA itu kita mengadakan pertemuan anggota KPA, namanya RAPOR (Rapat Koordinasi) Anggota KPA se-Banten. Kita mengadakannya setahun sekali. Paling setelah turun dana biasanya di pertengahan tahun. Jadi seluruh OPD yang asuk ke anggota KPA diundang sama kita. Terus kita juga menanyakan kepada anggota kita, apakah di OPD itu ada anggaran untuk penanggulangan HIV.

Untuk Rapat Koordinasi diselenggarakan sendiri oleh KPA, biasanya undangan ditandatangani sama ketua, ketuanya itu kan Gubernur Provinsi Banten, jadi kalau memanggil anggota KPA melewati surat yang ditandatangani oleh ketua, soalnya kan yang dipanggil kepala-kepala dinas atau OPD. Kalau untuk rapat internal bulanan sih biasanya pak sekretaris.

3. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan KPA dalam perencanaan kegiatan pencegahan HIV/AIDS?

Jawaban:

Kalau kita tuh rapat tahunan biasanya ada Rapat Koordinasi OPD itu sama ada juga pertemuan evaluasi Kabupaten Kota. Kalau yang RAKOR yang untuk anggota KPA itu setahun sekali. Biasanya membahas tentang bagaimana KPA kedepannya, terus bagaimana pencegahan HIV untuk sekarang dan akan datang. Kan penanggulangan HIV kan banyak *trend-trend* baru, seperti cara penularannya kalau tahun-tahun dulu dari narkoba tapi sekarang dari kelompok yang beresiko. Nah kita tuh harus tahu ini harusnya berhubungan dengan OPD apa. Kalau seperti di usia remaja bisa ke Dispora. Tapi kalau pertemuan evaluasi Kabupaten Kota sih hanya evaluasi bagaimana kendala dan hambatan di Kabupaten Kota.

KPA Provinsi sih menengahi antara KPA Kabupaten Kota dan KPAN. Jadi dari KPA Kabupaten Kota melaporkan ke KPA Provinsi, dari Provinsi melaporkan ke KPAN.

Lampiran 8

Transkrip Wawancara Informan Pendukung (Informan 5)

Nama : Drs. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdaagangan Orang pada Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai anggota KPA Provinsi Banten

Jenis Informan : Informan Pendukung

Tanggal wawancara : 15 Mei 2018

1. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial sebagai anggota ketika mengadakan kegiatan mengenai penanggulangan HIV AIDS?

Prosesnya diawali dengan pengajuan proposal, dengan surat proposal untuk permintaan bantuan kegiatan dari KPA yang ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial. Setelah itu baru nanti dibuat perencanaan. Pembuatan proposal itu kan setahun sebelumnya, baru nanti oleh kita dimasukkan dalam usulan rencana program kegiatan. Jadi kalau pelaksanaannya di tahun 2017 berarti diawali prosesnya dari tahun 2016 oleh KPA. Setelah dimasukkan ke dalam rencana kegiatan, kemudian di bahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, apakah layak atau tidak. Lalu jika disetujui, akan kita masukkan ke dalam DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Yang semula RKA atau Rencana Kegiatan Anggaran lalu menjadi DPA. Kemudian setelah menjadi DPA baru akan dilaksanakan oleh kita. Jadi kita Cuma pengadaan barang aja, tidak boleh berbentuk uang.

2. Bagaimana pelaksanaan untuk menjalin relasi yang dilakukan KPA dalam kegiatan pencegahan HIV/AIDS?

Jawaban:

Kalau untuk kegiatan tentang HIV kita minta dibantu oleh KPA, karena mereka yang tahu. Kita hanya membantu untuk proses pelaksanaannya saja. KPA juga mengadakan rapat evaluasi tahunan yang dimana KPA nanti mengundang anggotanya yang ada dari DinKes, DinSos, DinDik, ormasnya juga ada IPPI, Sahabat, dan banyak lagi. Nanti ada evaluasi masing-masing anggota, pertama mengevaluasi sejauh mana pencegahannya, menurunkan angka kematian, atau pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Dan data-data kita biasanya dipadukan antara data KPA dan data DinKes, nanti KPA menyajikan data, DinKes juga menyajikan data, terus membahas upaya penanggulangannya seperti apa. Disana juga dibahas mengenai strategi penanggulangannya misalkan dari DinKes apa saja strateginya, yang selama ini dilaksanakan oleh DinKes itu apa, melalui gerakan apa.

Kemudian dibahas juga mengenai program yang berjalan misalkan selama ini yang aktif mana, misalkan DinKes membantu pengobatan bagi ODHA, DinSos mengenai acara bantuan nutrisi susu kemudian mengucapkan terima kasih, terus ditanyakan partisipasi anggota yang lainnya. Memang kita sekarang tidak bisa langsung melakukan kegiatan yang menyangkut ODHA karena sudah tupoksi pusat, kalau kita mengadakan nanti akan menyalahi kewenangan. Jadi nanti pada perencanaan di Bappeda di coret, kita tidak boleh ngusulin ODHA nih, yg berbau-bau Napza tidak boleh, kecuali diluar ODHA dan Napza itu masih diperbolehkan.

3. Media apa yang digunakan KPA kepada Dinas Sosial sebagai anggota KPA dalam menyebarluaskan informasi?

Jawaban:

Kebanyakan sih kalau formal itu media surat menyurat dan forum rapat koordinasi. Biasana kan mulai dari perencanaan sama mungkin evaluasi, data-data disampaikan oleh mereka, kita kan sebagai anggota cuma melihat saja data-datanya.

Kalau untuk *whatsapp group* kita tidak pakai, hanya yang bersifat formal saja, dan paling maksimal *by phone* lah, langsung telepon. Contoh, saya ada rapat dengan kementerian di Bandung dan butuh data, jadi langsung saja komunikasi dengan Mba Berta *by phone*, dengan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) juga untuk pembandingan data jumlah HIV AIDS pertanggal berapa, gitu.

Lampiran 9

Transkrip Wawancara Informan Pendukung (Informan 6)

Nama : Kiki Annisa

Jabatan : Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Provinsi Banten

Jenis Informan : Informan Pendukung

Tanggal wawancara : 26 Mei 2018

1. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan IPPI Provinsi Banten salah satu anggota kepada KPA dalam pendistribusian informasi mengenai pencegahan HIV AIDS di Provinsi Banten?

Jawaban:

Kalau misalkan ada undangan kegiatan tuh biasanya *by e-mail*, karena mungkin... aku gak ngerti juga ya, KPA nya juga jarang maksudnya gak terlalu intens berkomunikasi sama organisasi dan temen-teman, cuman hanya sesekali waktu saja. Bukan karena memang dia penjabatan kali ya, jadi seharusnya sih lebih intens, cuman mungkin juga terbatas dari anggaran program kali ya.

2. Bagaimana pengkomunikasian mengenai SRAN yang menjadi rencana strategis dari KPA kepada anggota KPA khususnya komunitas?

Jawaban:

Kalau untuk masukan dari SRAN sendiri kalau misalkan, jujur ya selama aku jadi koordinasi IPPI Provinsi Banten beberapa tahun kebelakang, untuk SRAN itu gak ada komunikasi dari KPA, masukannya seperti apa, aku juga nggak ngerti. Belum mungkin.

Kalau untuk KPA nya sendiri untuk meminta masukkan dari IPPI Provinsi kayaknya belum pernah. Sebenarnya sih seharusnya berjalan bareng, beriringan. Kan namanya KPA adalah penjabatan dan

penghubung, seharusnya sih fungsinya KPA disitu. Entah gimana aku nggak ngerti juga, karena keterbatasan penganggaran atau gimana-gimananya, kalau untuk meminta masukkan untuk SRAN sendiri belum pernah kayanya, Cuma aku nggak tau sih kalau di jaman Koorprov IPPI yang dulu-dulu lagi.

3. Bagaimana media yang digunakan KPA untuk pendistribusian informasi ke IPPI sendiri?

Jawaban:

Ada rapat evaluasi ya. Biasanya sih rapat evaluasi ada per 3 bulanan kalau enggal per 6 bulanan. Cuman kayaknya untuk, lagi-lagi balik lagi penganggaran biasanya sih per 3 bulan. Dan yang aku tahu nggak semua komunitas yang ada di Banten ini diundang, mungkin hanya perwakilan aja kayak IPPI, ada OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia), terus ada Sahabat, kayak gitu. Diundang sih di rapat 3 bulanan. Cuman di tahun 2018 ini aku nggak ngerti, nggak tau karena anggaran atau bagaimana ya, sampai sekarang udah mau masuk habis semester pertama belum ada rapat evaluasi 3 bulanan, mau itu rapat koordinasi, rapat evaluasi, itu belum ada.

Rapat Koordinasi itu bukan hanya dengan komunitas, tetapi juga dengan semuanya. Jadi kita duduk satu meja, dari semua *stakeholder*. Jadi kan ada KPA Kabupaten Kota, ada organisasi, ada dinas-dinas, sama biasanya sih diundang ketuanya yaitu Gubernur, cuman jarang datang. Palingan kayak sekda nya, tapi sekjanya pun jarang datang, palingan dari dinas kesehatan.

4. Apa saja pembahasan di dalam rapat evaluasi tersebut?

Jawaban:

Biasanya sih yang dibahas, KPA hanya menyampaikan mereka telah melakukan apa, terus kalau misalkan mereka akan melakukan apa mereka akan meminta masukkan. Kayak misalkan mau ada hari AIDS sedunia, mereka minta masukkan nih, kegiatan apa yang mereka harus lakuin, terus siapa aja yang mau terlibat sebagai panitia. Kayak gitu.

Tapi minta sarannya itu nggak saran yang bisa dimasukkan ke dalam program. Sayangnya sih gitu. Seharusnya kan mereka meminta saran dari kita, organisasi yang memang bener-bener kita organisasi komunitas, kan seharusnya mereka meminta saran “”bagaimana nih untuk program kita kedepannya?”, “kalian butuh apa?”. Jadi hanya kadang-kadang saja. Biasanya begini, mereka udah punya program, mereka udah nyusun program, terus merek menjelaskan “nih kita punya program ini, kira-kira dari program yang kita punya bisa nggak selaras dengan programnya IPPI”, gitu. Palingan hanya penyalarsan program. Karena nggak mungkin juga mereka sudah mengajukan program yang ada terus mereka merubah kan. Palingan nanti adalah kalau misalkan kita ngasih masukkan untuk program, nanti ada APBD perubahan, nanti di semester ke-2.

5. Bagaimana media yang digunakan KPA untuk menyalurkan informasi kepada komunitas IPPI?

Jawaban:

Kalau untuk media sosial seperti *whatsapp group* itu nggak ada sih ya, berkomunikasinya lebih secara personal. Aku langsung ke Mba Berta, ke Bagian Programnya kan. Jadi komunikasinya kebanyakannya internal saja. Dengan sekretarisnya pun kalau misalkan kadang-kadang kalau kita main kesana, mereka pasti nanya “apa kabar?”, “sedang apa?”, “apa yang terjadi di lapangan?”. Tapi kita yang datang kesana, nggak mereka yang datang ke komunitas.

6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan IPPI banten dalam menumbuhkan rasa partisipatif masyarakat?

Jawaban:

Jadi kan IPPI Provinsi Banten itu dari Koordinator Provinsi ini dia punya yang namanya *vocal point* yang adanya itu di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Tapi belum ke Pandeglang dan Rangkas. Kalau misalkan IPPI Bantennya sendiri berkomunikasi kepada masyarakat

mungkin anggotanya di Banten juga termasuk masyarakat. Karena anggota kami kebanyakannya kan kalau enggak ibu rumah tangga, kalau enggak petugas lapangan, pendampingan temen-temen ataupun penjangkauan.

7. Bagaimana hambatan dalam menumbuhkan rasa partisipatif masyarakat khususnya di Provinsi Banten?

Jawaban:

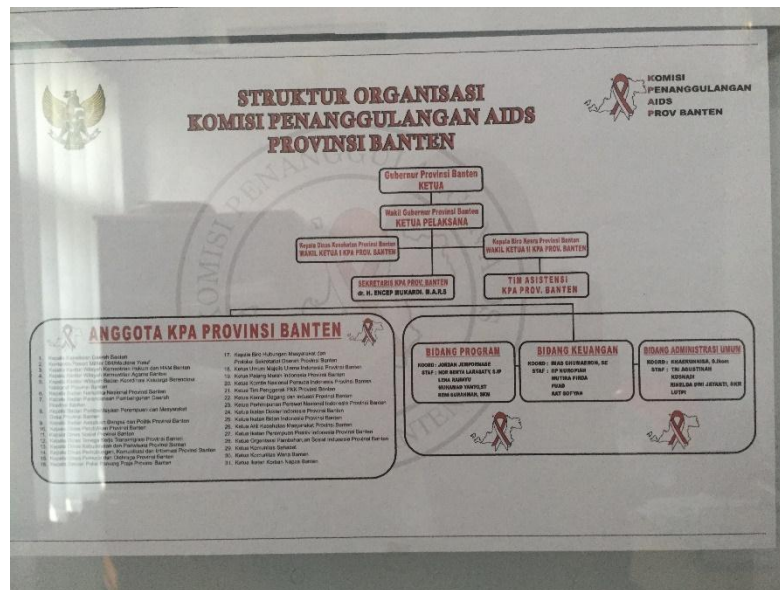
Kalau kita sih sosialisasi-sosialisasi dimanapun kita berada, di media sosial sekalipun kalau misalkan ada program-program penanggulangan pencegahan gitu suka di *share*, karena memang *public campaign* yang paling mudah itu kan melalui media sosial karena memang nggak perlu biaya yang besar, hanya bermodalkan kuota informasi bisa disampaikan ke masyarakat.

Lampiran 10

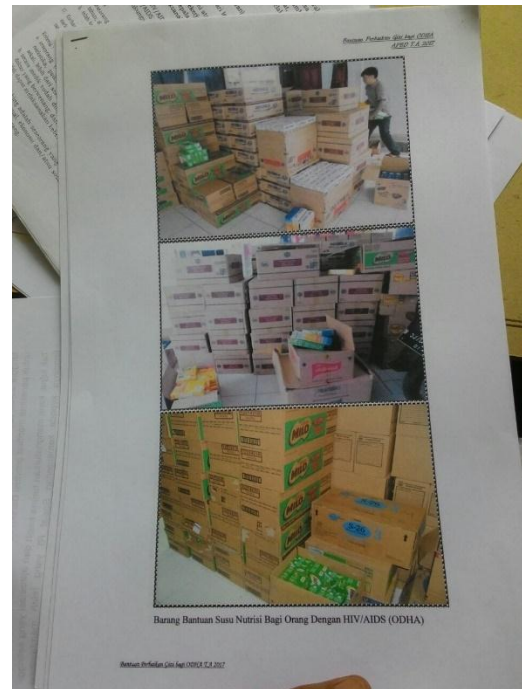
Dokumentasi



Pelaksanaan kegiatan Warga Peduli AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten, yang diselenggarakan di Labuan, Pandeglang.



Struktur Organisasi KPA Provinsi Banten yang dipajang di Kantor KPA Provinsi Banten.



Kegiatan Pemberian Nutrisi bagi ODHA sebagai salah satu program yang diusung KPA Provinsi Banten bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten.



Pelaksanaan wawancara dengan Sekretaris KPA Provinsi Banten, Dr. Encep Mukardi, M.A.R.S.



Pelaksanaan wawancara dengan Koordinator Bidang Administrasi Umum KPA Provinsi Banten, Khaerunnisa, S.Ikom.



Pelaksanaan wawancara dengan Koordinator Bidang Program KPA Provinsi Banten, Jordan Jempomase.



Pelaksanaan wawancara dengan Koordinator Bidang Keuangan KPA Provinsi Banten, Imas Chumaeroh, SE.



Pelaksanaan wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdaagangan Orang pada Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai anggota KPA Provinsi Banten, Drs. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si.



Pelaksanaan wawancara dengan Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Provinsi Banten, Kiki Annisa.

BIODATA PENULIS



Nama : Trina Dhamartika
Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 2 Mei 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : trinadhamartika2@gmail.com
No. HP : 082191995465
Alamat : Link. Temu Putih (Belakang SMP Pembangunan)
RT/RW. 02/02, Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota
Cilegon – Banten 42411

Riwayat Pendidikan:

2002 – 2008 SD Wukir Retawu Suralaya
2008 – 2011 SMP Negeri 3 Cilegon
2011 – 2014 SMA Negeri 4 Cilegon
2014 – 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengalaman Organisasi :

Anggota Divisi Desain Grafis Multimedia Untirta 2015 - 2017